

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Alokasi anggaran pembangunan yang dikeluarkan merupakan peran pemerintah dalam investasi di bidang pembangunan nasional. Selanjutnya kesempatan kerja dan pembangunan yang meningkat adalah salah satu ciri dari kualitas pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyerap tenaga kerja yang semakin banyak.

Selain investasi dan anggaran pemerintah ada variabel zakat yang merupakan komponen penting dari kehidupan sosial keagamaan umat Islam, mengingat potensi zakat di Indonesia sangatlah besar yaitu sebesar Rp 327 Triliun, sebagaimana rilis Baznas tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20%. Namun sangatlah disayangkan, potensi besar yang dimiliki belum diimbangi dengan fundraising yang baik, hal ini terlihat dari pengumpulan zakat secara nasional pada tahun 2021 hanya sebesar 14 Triliun atau sekitar 4,28% dari proyeksi potensinya.

Buku ini membahas keterkaitan antara investasi, pengeluaran pemerintah serta zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.



Adnan Subekti, S.E., M.E, dilahirkan di Kota Samarinda pada tanggal 20 Mei 1993. Latar belakang pendidikan S1 di Universitas Mulawarman pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, kemudian menempuh pendidikan Master di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada tahun 2020 dan selesai tahun 2022 Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis dapat dihubungi melalui email: adnanbekti22@gmail.com atau instagram: [adnansbekti](https://www.instagram.com/adnansbekti)



Dr. Mursyid, S.Ag., MSI., adalah Dosen Tetap pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sejak tahun 2007 hingga sekarang. Lahir di Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Maret 1974. Pendidikan Sarjana di mulai pada Diploma II Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dan diselesaikan pada tahun 1995. Menyelesaikan S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 1999, Gelar Master diraih pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2003 dan program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Universitas yang sama pada tahun 2020. Penulis dapat dihubungi melalui email: mursyid@uinsi.ac.id

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perspektif Ekonomi Islam



Yogyakarta

Jl. Humaniora, Yogyakarta 55281 Telp. 0274 548510-548515 Ext. 201
Jl. Gambiran No. 37, Yogyakarta 55161 Telp. (0274) 373760, 375568
Fax (0274) 380819 website : www.bpfe.feb.ugm.ac.id – email : bpfe_yk@yahoo.com

ISBN : 978-979-503-633-3



Adnan Subekti, S.E., M.E
Dr. Mursyid, S.Ag., MSI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perspektif Ekonomi Islam

Oleh:

Adnan Subekti, S.E., M.E
Dr. Mursyid, S.Ag., MSI



Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Jl. Humaniora, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 548510 - 548515 Ext. 201

Jl. Gambiran No. 37 Yogyakarta 55161 Telp. (0274) 373760, 375568 Fax. (0274) 380819

• Website: www.bpfe.feb.ugm.ac.id. • e-mail: bpfe_yk@yahoo.com.

Kutipan Pasal 72:

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ISBN: 978-979-503-633-3

**PERTUMBUHAN EKONOMI
Perspektif Ekonomi Islam**

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Oktober 2022

Oleh:

Adnan Subekti, S.E., M.E

Dr. Mursyid, S.Ag., MSI

© Hak cipta ada pada penulis. Hak terbit ada pada BPFE-YOGYAKARTA. Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

Dicetak dan Diterbitkan oleh:

BPFE –YOGYAKARTA

Anggota IKAPI

No. 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku ini telah selesai disusun. Buku ini disusun agar dapat membantu para pembaca dalam mempelajari dan memahami materi tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam terutama bagi kaum awam yang belum mengenal konsep pertumbuhan ekonomi Islam dalam perspektif ekonomi Islam.

Selesainya penulisan buku ini, penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca seraya berharap kritik membangun untuk kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Samarinda, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan	13
E. Kajian Pustaka	14
BAB 2 LANDASAN TEORI	19
A. Dasar Teori	21
1. Teori Ekonomi Makro Islam	21
2. Pendapatan Nasional Islam	24
3. Ketenagakerjaan dalam Islam	26
4. Pertumbuhan Ekonomi	29
5. Kesempatan Kerja	30
6. Investasi	31
7. Pengeluaran Pemerintah	34
8. Zakat	38
B. Hubungan Antar Variabel	46
1. Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja	46
2. Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja	46
3. Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja	47
BAB 3 PERTUMBUHAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	51
A. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	53
B. Kondisi Investasi Di Indonesia	54
C. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Indonesia	55

D. Kondisi Kesempatan Kerja Indonesia	56
E. Kondisi Zakat di Indonesia	58
F. Rekapitulasi Data Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja	59
BAB 4 PERTUMBUHAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	61
A. Analisis	63
1. Statistik Deskriptif	63
2. Analisis Jalur	68
3. Pengujian Hipotesis	80
BAB 5 PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1 Realisasi Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001 s.d. 2021	5
TABEL 1.2 Realisasi Zakat dan Kesempatan Kerja di Indonesia Tahun 2001 s.d. 2021	9
TABEL 1.3 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020	10
TABEL 1.4 Penelitian Terdahulu	14
TABEL 3.1 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001 s.d. 2021	53
TABEL 3.2 Realisasi Investasi Indonesia Pada Tahun 2001 s.d. 2021	
TABEL 3.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Pada Tahun 2001 s.d. 2021	57
TABEL 3.4 Realisasi Kesempatan Kerja Di Indonesia Pada Tahun 2001 s.d. 2021	58
TABEL 4.1 Realisasi Penerimaan Zakat Di Indonesia Pada Tahun 2001 s.d. 2021	60
TABEL 4.2 Statistik Deskriptif	63
TABEL 4.3 Nilai R Square Model	70
TABEL 4.4 Q Square	71
TABEL 4.5 SRMR Model	72
TABEL 4.6 Hasil Uji Pengaruh Langsung	73
TABEL 4.7 Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung	79
TABEL 4.8 Hasil Pengujian Hipotesis	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2001 – 2021 64
GAMBAR 4.2	Kesempatan Kerja 2001-2021 65
GAMBAR 4.3	Investasi Indonesia 2001– 2021 66
GAMBAR 4.4	Pengeluaran pemerintah Indonesia Tahun 2001 – 2021 67
GAMBAR 4.5	Zakat Negara Indonesia 2001 – 2021 68
GAMBAR 4.6	Model Diagram Jalur dalam Software PLS 69
GAMBAR 4.7	Hasil Estimasi Model Analisis Jalur – bootstrapping 500 73
GAMBAR 4.8	Path Model 77

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ekonomi adalah hal fundamental bagi negara-negara di belahan dunia selama 2 abad terakhir. Kontribusi yang dilakukan oleh aspek ekonomi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menyediakan peluang kerja seiring meningkatnya populasi membuat peran ekonomi menjadi hal yang krusial.¹

Schumpeter menyatakan meskipun pertumbuhan ekonomi di dunia berjalan stagnan, inovasi baru pada sektor bisnis kreatif meningkat seiring perkembangan zaman. Mekanisme investasi yang dijalankan untuk mengangkat kenaikan bisnis secara tidak langsung dapat berefek pada sektor ekonomi suatu negara. Dengan perkembangan ekonomi yang mengarah positif, penghasilan masyarakat akan meningkat dan berdampak pada kesejahteraan. Lebih lagi, ekosistem investasi di berbagai lini bisnis akan meningkat pula.²

Harrod-Domar menjelaskan bahwa peningkatan anggaran yang berkelanjutan akan mendorong peningkatan ekonomi jangka panjang. Syarat terjadinya peningkatan kestabilan ekonomi adalah terjadi ketika $I+G+(X-M)$ berkembang secara konsisten dengan kecepatan stabil.³

Peran dan juga efek yang dirasakan oleh masyarakat merupakan indikasi akan kualitas pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya peluang kerja dan peningkatan pembangunan pada lini riil yang meningkat adalah salah satu ciri dari kualitas pertumbuhan ekonomi karena dapat menyerap tenaga kerja semakin banyak.⁴

¹Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Pengantar*, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 421.

²*Ibid*, 434.

³*Ibid*, 436.

⁴Aas Nurasyiah A. Jajang W. Mahri, Cupian, M. Nur Rianto Al Arif Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, Azizon, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 230.

Investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, hal tersebut akan memicu perusahaan manufaktur untuk semakin aktif yang berefek pada peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan infrastruktur negara dan pemulihan ekonomi memiliki korelasi yang baik terhadap investasi, karena pembangunan dipengaruhi oleh adanya peningkatan pendapatan nasional.

Selain itu, investasi memiliki kontribusi terhadap meluasnya lingkungan bisnis. Dengan banyaknya investasi maka jumlah perusahaan baru yang berkembang semakin banyak pula. Hal ini juga dapat berefek pada tersedianya lapangan kerja, terserapnya tenaga kerja, meningkatnya daya beli, kontribusi untuk pembangunan nasional, dan pencegahan turunnya ekonomi pada kuartal selanjutnya.

Teori model pengganda investasi diperkenalkan pada tahun 1936 dalam teori umum Keynes tentang pekerjaan, bunga, dan mata uang. Dikatakannya, peningkatan investasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Keynes menambahkan bahwa ketika output berubah, demikian juga investasi, dibandingkan dengan penawaran agregat. Pengganda investasi menunjukkan hubungan antara peningkatan awal investasi dan peningkatan pendapatan nasional yang dihasilkan. Ini adalah ukuran perubahan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan investasi. Dengan demikian, ini menjelaskan hubungan antara investasi yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi yang dihasilkan.⁵

Investasi dapat terpengaruh beberapa faktor seperti halnya investasi asing dan lokal secara bersamaan berpengaruh pada iklim investasi tersebut. Umumnya, investasi dapat diperoleh dari modal publik dan swasta. Investasi yang bersumber dari pihak swasta dapat berasal dari pihak luar negeri ataupun dalam negeri.

Jumlah investasi yang bersumber dari pihak pemerintah bisa diketahui melalui perbedaan anggaran totalnya dengan pengeluaran yang terealisasi. Terealisasinya investasi (PMDN – PMA) di Indonesia membuktikan bahwa pemerintah kurang optimal dalam menarik investor guna menstimulus pertumbuhan perekonomian di daerah yang berpotensi. Berikut tabel mengenai realisasi investasi dan pengeluaran pemerintah serta perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 s.d. 2020.

⁵Huong Lan Thi Hoang Chi Dieu Thi Nguyen, Bao Thai Luong, "The Impact of Logistics and Infrastructure on Economic Growth: Empirical Evidence from Vietnam," *International Journal of Trade and Global Markets* 1, no. 1 (2021): 1.

TABEL 1.1
Realisasi Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001s.d. 2021

TAHUN	REALISASI INVESTASI (MILIAR)		PENGELUARAN PEMERINTAH (Miliar)	PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)
	PMDN	PMA		
2001	58.816,0	15.055,9	315.756	3,6
2002	25.307,6	9.789,1	344.009	4,5
2003	48.484,8	13.207,2	370.155	4,8
2004	37.140,4	10.279,8	374.351	5,0
2005	50.577,4	13.579,3	397.769	5,7
2006	162.767,2	15.624,0	647.668	5,5
2007	34.878,7	10.341,4	763.571	6,3
2008	20.363,4	14.871,4	854.66	6,0
2009	37.799,9	10.815,2	1.037.067	4,6
2010	60.626,3	16.214,8	1.047.666	6,2
2011	76.000,8	19.474,5	1.229.558	6,2
2012	92.182,0	24.564,7	1.435.407	6,0
2013	128.150,6	28.617,5	1.683.011	5,6
2014	156.126,3	28.529,7	1.842.495	5,0
2015	179.465,9	29.275,9	2.039.483	4,9
2016	216.230,8	28.964,1	2.095.725	5,0
2017	262.350,5	32.239,8	2.080.451	5,1
2018	328.604,9	29.307,9	2.220.657	5,2
2019	386.498,4	28.208,8	2.461.112	5,0
2020	413.535,5	28.666,3	2.540.423	-2,1
2021	447.063,5	31.093,1	2.750.028	3,7

Sumber: BPS

Islam mendorong umatnya untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan setelah kematian. Memperoleh kehidupan yang layak di dunia dan di akhirat, akan memungkinkan umat muslim mencapai kesejahteraan lahir dan batin (falah).⁶Investasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah.

⁶Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

Terlihat pada Tabel 1.1 untuk realisasi investasi, pengeluaran pemerintah serta perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 s.d. 2020 dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi untuk PMA adalah pada tahun 2020 sebesar Rp 413.535,5 miliar sementara PMDN paling tinggi adalah tahun 2017 dengan nominal Rp32.239,8 miliar. Sedangkan realisasi pengeluaran pemerintah yang paling tinggi adalah tahun 2021 dengan nominal Rp2.750.028 miliar, dan peningkatan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,3 persen dan yang terendah tahun 2021 sebesar -2,1% hal ini terjadi karena wabah covid 19 yang membuat ekonomi global menurun. Secara umum, data investasi, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif.

Alokasi anggaran pada pembangunan dapat menjadi peran pemerintah dalam investasi di bidang pembangunan nasional. Hal ini karena anggaran tersebut digunakan untuk mendanai sektor produktif yang memiliki kontribusi pada pemasukan daerah.⁷

Pembangunan yang terjadi di daerah merupakan peran dari masyarakat sebagai pelaksana dan penyumbang yang dialokasikan pada anggaran pemerintah daerah. Meskipun sumbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah hal yang fundamental, namun dengan nominal maksimum adalah seperempat produk domestik bruto (PDB) tidak dapat mencukupi kebutuhan pembangunan.

Selain itu, anggaran pemerintah sebagai rencana kerja non-kualitatif dinyatakan menggunakan standar satuan moneter atau satuan lain untuk periode satu tahun.⁸ Anggaran tersebut memuat jumlah belanja maksimum dari pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan estimasi perolehan pendapatan melalui siklus perekonomian dalam waktu tertentu.⁹

Para ahli berpendapat bahwa anggaran pemerintah merupakan rencana penetapan kegiatan secara sistematis, seperti halnya kegiatan yang ditetapkan dalam mata uang rupiah yang berlangsung secara satu tahun.

Dalam hal percepatan kegiatan ekonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan dalam membatasi pengeluaran rutin dan pembangunan. Tingkat urgensi dari pembangunan dan kondisi daerah merupa-

⁷Fuadi Randi, *Kewenangan Dan Fungsi Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Rafika Adiatama, 2008).27.

⁸Mulyadi Sumbri, *Manajemen Keuangan Publik* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 69.

⁹Marsono. M, *Konsep Anggaran Pemerintah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).66.

kan hal yang dipertimbangkan karena berpengaruh pada besarnya pengeluaran dengan dampak yang dihasilkan.

Pengeluaran pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan, sedangkan persentase pengeluaran pemerintah untuk belanja kebutuhan PDRB dan pemanfaatannya perlu dioptimalkan. Namun, tidak semua pengeluaran diklaim berkontribusi terhadap pembangunan, melainkan, hanya sebagian dari hal tersebut yang berpengaruh seperti belanja modal serta belanja barang dan jasa.

Pengeluaran pemerintah dapat dicirikan sebagai pengeluaran otonom karena pendapatan nasional tidak memiliki efek yang kontras dalam keputusan penetapan anggaran pemerintah. Pada dasarnya, tiga elemen penting menentukan pengeluaran pemerintah pada tahun tertentu: pertama, pendapatan yang diantisipasi, kedua, masalah politik, dan ketiga, tantangan ekonomi yang dihadapi.

Selain itu, pemerintah harus mengelola pendapatan untuk mendukung fasilitas umum dan redistribusi pendapatan. Pendapatan ini dihasilkan melalui pajak atas pendapatan pribadi dan perusahaan, tenaga kerja, dan penjualan produk konsumen. Seluruh tingkat pemerintahan memungut pajak untuk menutupi biaya operasionalnya.¹⁰ Menurut Wijaya, belanja pemerintah memiliki dampak pengganda dan mendorong pertumbuhan pendapatan nasional yang lebih banyak dibanding dengan pembayaran dalam nominal serupa. Pengeluaran pemerintah meningkatkan penghasilan dan output dengan faktor dua selama ekonomi tidak pada kesempatan kerja penuh dan meningkatkan permintaan agregat didasarkan pada gagasan bahwa pengeluaran pemerintah tidak digunakan untuk menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.¹¹

Selain investasi dan anggaran pemerintah, ada juga zakat yang merupakan komponen penting dari kehidupan sosial-keagamaan umat Islam. Di mana orang mampu (mereka yang masuk dalam syarat) wajib untuk menyumbangkan sebagian dari hartanya (sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang) untuk membantu orang lain yang membutuhkan (8 Ashnaf). Zakat merupakan landasan sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan solusi yang tepat untuk menyeimbangkan kekayaan dan kesejahteraan pada masyarakat juga menghilangkan ketidakseimbangan yang tidak diantisipasi oleh sebagian besar orang. Zakat bermanfaat bagi

¹⁰Paul A Samuelson, *Makro-Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006).39.

¹¹Widjaya. H.A.W., *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT. Raja: Grafindo Persada, 2006), 64.

mereka yang membutuhkan dengan meringankan beban mereka, tetapi juga bermanfaat bagi mereka yang mengeluarkannya.

Indeks zakat mengukur kekayaan negara Islam dan berfungsi sebagai barometer kekuatan negara/masyarakat ekonomi Islam. Kondisi ini menjadi signifikan di dunia kontemporer, melalui ekonomi Islam, karena mewakili jumlah kepatuhan zakat, distribusi zakat, dan tingkat kesejahteraan keseluruhan masyarakat secara ekonomi. Data ini sangat bermanfaat untuk digunakan pemerintah agar dapat memotivasi pembuat keputusan masyarakat Islam itu sendiri untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Informasi ini juga bermanfaat sebagai representasi tingkat religiusitas umat Islam, karena amanat zakat merupakan perintah dari sang pencipta.¹²

Saat ini, zakat yang dikelola secara profesional dengan menempatkan prioritas pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sehingga memungkinkan mereka untuk lebih produktif dalam mencukupi kebutuhan mereka. Profesionalitas tata kelola zakat tidak berarti bahwa harta zakat diberikan untuk mustahiq guna dikonsumsi dan menyimpang secara signifikan dari pragmatisme zakat sebelumnya. Selain itu, pengaruh ekonomi dari penerapan zakat dapat diperhatikan. Dalam pelaksanaannya, zakat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Diantara dampak yang dari zakat yakni:

1. Produksi
Dengan zakat, permintaan baru yang potensial akan tercipta, meningkatkan permintaan dan menstimulasi produsen dalam menambah output dalam mencukupi permintaan.
2. Investasi
Efek lain dari penambahan output yaitu akan mendukung bisnis dalam peningkatan investasi.
3. Lapangan kerja
Lebih banyak investasi akan menghasilkan peningkatan output, sehingga berdampak pada peningkatan kesempatan kerja.
4. Pertumbuhan ekonomi
Hal ini akan mempercepat pembangunan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi.
5. Kesenjangan sosial

¹²KA Kusuma, "Mengembangkan Indikator Ekonomi Islam Melalui Zakat: Sebuah Kerangka Untuk Mengukur Kesejahteraan Masyarakat/Negara Muslim," no. 9 (2016), 262.

Zakat juga berkontribusi pada distribusi ekonomi, terutama dengan mempersempit kesenjangan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan sosial.¹³

Tabel II menjelaskan beberapa perkembangan zakat dan kesempatan kerja sebagai berikut:

TABEL 1.2
Realisasi Zakat dan Kesempatan Kerja di Indonesia
Tahun 2001 s.d. 2021

TAHUN	ZAKAT (Miliar)	KESEMPATAN KERJA (Orang)
2001	120.694549.04	90.807.417
2002	288.643.666.13	91.647.166
2003	1.307.300.388.00	90.784.917
2004	2.224.208.946.64	93.722.036
2005	2.540.588.847	94.948.118
2006	4.825.501.587	95.456.935
2007	8.307.940.585	99.930.217
2008	15.355.092.415	102.552.750
2009	19.371.179.661	104.870.663
2010	12.769.270.318	108.207.767
2011	11.365.267.381	109.670.399
2012	4.368.892.219	110.808.154
2013	50.741.735.215	110.804.041
2014	3.826.832.451.83	114.628.026
2015	66.766.033.369	114.819.199
2016	97.637.657.910	118.411.973
2017	138.096.290.551	121.022.423
2018	153.153.229.174	124.004.950
2019	248.342.677.327	126.515.119
2020	305.347.256.942	128.454.184
2021	24.771.249.047,37	131.050.523

Sumber: BPS dan Baznas

Berdasarkan Tabel II diperoleh data bahwa zakat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Zakat paling besar ada di tahun 2021 yaitu Rp24.771.249.047,37 dan yang terendah pada tahun 2001 yaitu Rp120.694549.04. Kemudian kesempatan kerja yang disediakan oleh pemerintah yang tertinggi adalah tahun 2021 sebanyak 131.050.523 orang dan yang terendah pada tahun 2003 sebanyak 90.784.917 orang. Namun

¹³Muhammad Syahbudi, “*Ekonomi Makro Perspektif Islam*” (2018): 14-15.

sebenarnya potensi zakat di Indonesia sangat besar, Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp233,8 triliun , tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8. Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp327,6 triliun.

TABEL 1.3
Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun)
1	Pertanian	19,79
2	Peternakan	9,51
3	Uang	58,76
4	Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Zakat secara historis menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan PDB nasional suatu negara dan mampu mendorong kemakmuran. masa Umar bin Abdul Aziz dan struktur pemerintahannya, khususnya dalam hal zakat dan perpajakan. Lebih jauh, ide-ide terkini dinyatakan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam, seperti dampak pengganda zakat (*multiplier effect of zakat*), telah menunjukkan bagaimana mekanisme zakat dapat mendukung pendapatan nasional kearah positif dan berdampak pada perekonomian.

Bantuan konsumtif sendiri memiliki dampak berlipat ganda (*multiplier of zakat*) yang kuat. Selain itu, apabila zakat didistribusikan dalam modal usaha, dampak pengganda yang dicapai dalam suatu perekonomian akan jauh lebih tinggi, karena zakat memiliki pengaruh dua kali lebih besar daripada zakat yang diserahkan dalam wujud bantuan konsumtif. Selain itu, menghitung zakat melalui pendekatan makro ekonomi pada pendapatan nasional telah menunjukkan bahwa zakat memiliki efek positif pada pendapatan nasional, menyiratkan bahwa hal itu memiliki efek yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

Bagian pengeluaran suatu negara yang tidak bersumber dari zakat seluruhnya dikategorikan kedalam hak ekonomi suatu negara. Besaran

penyaluran fa'I memiliki tujuan utama untuk mendukung kehidupan seluruh masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah, baik yang bersumber dari luar maupun dalam negeri serta untuk mendorong berkembangnya kualitas kehidupan sosial sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah.¹⁴

Zakat, dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara, harus dialokasikan dan diberdayakan secara tepat. Zakat memainkan peran penting dalam upaya memberdayakan proyeksi ekonomi umat. Islam menawarkan cara lain dan jawaban strategis berupa sistem pengelolaan (pendistribusian dan penggunaan) zakat yang produktif dan inovatif.

Zakat adalah suatu kegiatan yang memiliki dua tujuan yaitu tujuan ukhrawi dan juga tujuan duniawi. Zakat terkait dengan pahala, yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Dampak duniawi dari kegiatan zakat diantaranya adalah kestabilan ekonomi, distribusi pendapatan yang tidak terpusat, serta alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang lebih besar.¹⁵

Kemakmuran dan kebahagiaan merupakan komponen penting dari kehidupan masyarakat. Bangsa yang maju adalah bangsa yang sejahtera dan warganya bahagia, atau bangsa yang telah sampai pada maqashid al-Syariah (tujuan Syariah). Umat yang diridhoi oleh Allah SWT adalah analogi yang tepat tentang pandangan Islam terhadap masyarakat. Untuk memenuhi gagasan ini, Islam menawarkan visi dan tujuan berupa tatanan sosial ekonomi yang adil, sebagaimana tercermin dalam tuntunan fundamental Islam dan sejarah Islam awal.

Menurut temuan penelitian ini, zakat merupakan inovasi dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat sangat penting karena merupakan alat untuk redistribusi kekayaan, yang berperan dalam mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi, memutus siklus kemiskinan, dan mendorong percepatan pembangunan suatu bangsa. Zakat sangat penting untuk alasan ini. Penelitian ini melihat pentingnya zakat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam komunitas Muslim, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu maupun orang-orang di sekitarnya.

¹⁴A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Terjemahan Oleh Ansyari Thayib* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997).277.

¹⁵Luqyan Tamanni Ade Rahman, Choirul Yazid and Dkk, *Suplemen Ekonomi Islam* (Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA, n.d.).150.

Dalam sistem yang adil seperti itu, sumber daya pembangunan ekonomi diciptakan secara kontinu, dan kekayaan diberikan secara merata kepada semua anggota masyarakat. Ekonomi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman perlu untuk ditingkatkan pada aspek kajian teknis berbagai kategori dalam hal pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga zakat merupakan indikator yang digunakan sebagai alat ukur tersebut.

Penggunaan indikator zakat oleh umat Islam, utamanya para pemimpin dan pemerintah, seharusnya mampu mengembangkan kebijakan yang akan menambah tingkat kemakmuran umat Islam di masa yang akan datang. Hal ini dapat berupa kebijakan pendistribusian zakat yang efektif dan efisien. Kriteria ekonomi umat Muslim perlu dibangun karena akan sangat berguna bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat muslim, tidak hanya dari segi kemakmuran fisik, tetapi dalam hal mensucikan harta dan jiwa umat Islam. Tidaklah sulit untuk menghidupkan kembali dan memelihara amalan Nabi demi tercapainya kehidupan yang lebih baik yang bagi seluruh masyarakat baik muslim ataupun non-muslim.¹⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang zakat dan menunjukkan hasil bahwa zakat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu, Eko Suprayitno,¹⁷ Mohd Naim Bin Kamaruzaman, Ahmad Syubaili Bin Mohamed, Nurul Syuhada Binti Zaidi, Amir Aiman Bin Ibrahim.¹⁸

B. Definisi Operasional

Peneliti akan menjabarkan definisi operasional variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur dampak investasi, pengeluaran pemerintah, dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia.

Variabel yang dipakai adalah variabel eksogen, yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, dan zakat dan variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Definisi operasional variabel yang dipakai dalam kajian ini meliputi:

¹⁶Kusuma, "Mengembangkan Indikator Ekonomi Islam Melalui Zakat: Sebuah Kerangka Untuk Mengukur Kesejahteraan Masyarakat/Negara Muslim." no. 9 (2016), 263.

¹⁷Eko Suprayitno, "Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth , Consumption and Investment in Malaysia" 101, no. Iconies 2018 (2019).

¹⁸Ahmad Syubaili et al., "Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor , Malaysia ?" 9, no. 6 (2019): 786–807.

1. Pertumbuhan Ekonomiyaitu jumlah peningkatan pendapatan riil nasional pada periode tertentu dengan satuan persentase.
2. Kesempatan kerja yaitu jumlah ketersediaan lowongan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sesuai jumlah penduduknya dalam satuan orang.
3. Investasi yakni penanaman modal asing (PMA)dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yangterrealisasi menggunakan satuan rupiah.
4. Pengeluaran Pemerintah yakni kebijakan terkait anggaran pemerintah untuk belanja negara dalam satuan rupiah.
5. Zakat yakni jumlah total nilai zakat nasional dalam satuan rupiah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah investasi berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
3. Apakah zakat berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berdampak pada Kesempatan Kerja di Indonesia?
5. Apakah investasi melalui Pertumbuhan Ekonomi berdampak pada Kesempatan Kerja di Indonesia?
6. Apakah pengeluaran pemerintah melalui Pertumbuhan Ekonomi berdampak pada Kesempatan Kerja di Indonesia?
7. Apakah zakat melalui Pertumbuhan Ekonomi berdampak pada Kesempatan Kerja di Indonesia?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dampak Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia.
5. Untuk mengetahui dampak investasi melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia.
6. Untuk mengetahui dampak pengeluaran pemerintah melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini dimanfaatkan sebagai rujukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi rujukan pada penelitian ini, diantaranya

TABEL 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gatot Setio Harijono, I Made Suyana Utama (2013) E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis <u>Volume.02.N0.06.Tahun 2013 /</u>	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi.	Dampak substansial pada peningkatan ekonomi dan peluang kerja di Bali berasal dari pengeluaran pemerintah, sedangkan investasi berefek secara signifikan pada peningkatan ekonomi namun lemahnya peluang kerja.
2	Hellen, Sri Mintarti, Fitriadi(2017) journal.feb.unmul/ Inovasi Volume 13 (1), 2017, 28-38	Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada dampak substansial secara langsung pada investasi dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Malinau 2. Dampak substansial secara langsung disebabkan oleh tenaga kerja di Kabupaten Malinau 3. Peluang kerja tidak secara langsung berdampak substansial dari adanya investasi dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Malinau. 4. Dampak substansial secara langsung disebabkan oleh tenaga kerja di Kabupaten Malinau 5. Dampak substansial secara langsung disebabkan pertumbuhan ekonomi pada terse-

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>diannya kesempatan kerja di Kabupaten Malinau.</p> <p>6. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau secara tidak langsung disebabkan adanya investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja.</p>
4	<p>Sri Danawati, I K.G. Bendesa, Made Suyana Utama (2016) E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016): 2123-2160</p>	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali</p>	<p>Dampak positif kesempatan kerja ditimbulkan dengan adanya pengeluaran pemerintah dan investasi.</p> <p>Sedangkan dampak positif peningkatan ekonomi disebabkan adanya investasi.</p> <p>Di lain sisi dampak positif peningkatan ekonomi terjadi akibat kesempatan kerja meskipun tidak substansial.</p> <p>Dampak positif pada ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara substansial disebabkan oleh pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja sedangkan tidak secara substansial oleh investasi.</p>
5	<p>Bayu Dwi Dharma, Sjamsu Djohan (2015) Jurnal Kinerja Vol 12 No.1. 2015</p>	<p>Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kota Samarinda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan investasi di Kota Samarinda mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan kata lain bahwa investasi memiliki dampak positif dan substansial terhadap peningkatan ekonomi. 2. Kenaikan inflasi memiliki dampak negatif dan substansial terhadap peningkatan ekonomi di Kota Samarinda. 3. Kesempatan kerja dipengaruhi secara positif namun tidak substansial oleh investasi, namun secara negatif oleh adanya inflasi di Kota Samarinda. 4. Peningkatan ekonomi memiliki dampak positif namun tidak substansial terhadap kesempatan kerja di kota Samarinda

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	Nurfaidah A. (2019) Tesis	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan	Penyerapan tenaga kerja secara positif dan substansial terlihat dengan adanya alokasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, namun tidak terlihat proyeksi yang sama di bidang kesehatan. Sehingga korelasi antara pertumbuhan ekonomi pada penyerapan tenaga kerja dengan alokasi pengeluaran pemerintah tidak berjalan secara beriringan.
7	Khun Sokang (2018) International Journal of Innovation and Economics Development, vol.4, issue 5, pages 31-38, December 2018	The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth in Cambodia: Empirical Evidence	FDI berdampak positif dengan pertumbuhan ekonomi Kamboja.
8	Diouf Modou, Hai Yun Liu (2017) International Journal of Innovation and Economics Development, vol. 3, issue 1, pp. 72-85, April 2017	The Impact of Asian Foreign Direct Investment, Trade on Africa's Economic Growth	FDI dan perdagangan berdampak substansial dengan pertumbuhan ekonomi
9	Yugang He (2018) International Research in Economics and Finance; Vol. 2, No. 1; April, 2018	Foreign Direct Investment, Economic Growth and Employment: Evidence from China	Investasi asing berdampak positif dengan peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi berdampak positif dengan ketenagakerjaan. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi ada kausalitas dua arah. Sementara itu, penanaman modal asing langsung juga dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja.
10	Bashir Olayinka Kolawole, Sunkanmi Ayoola Odubunmi (2015) Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 6 No 4 S3 August 2015	Government Capital Expenditure, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Relationship in Nigeria	Pengeluaran modal pemerintah dan pertumbuhan Granger memberikan pengaruh satu sama lain, sebagai kausalitas searah antara pertumbuhan dan FDI. Namun, ada hubungan kausalitas Granger antara modal pemerintah, pengeluaran, dan FDI. Lebih lanjut terungkap bahwa belanja modal pemerintah berdampak positif dan substan-

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sial dengan pertumbuhan ekonomi.
11	Eko Suprayitno (2018) <i>Advances in Economics, Business and Management Research</i> , volume 101. 1st International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)	Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia	Zakat berdampak positif dan substansial dengan ekonomi pertumbuhan, konsumsi, dan investasi. Hal ini berarti bahwa peningkatan ekonomi, investasi, dan konsumsi dipengaruhi oleh penyaluran zakat. Terakhir, hasil analisis ECM menunjukkan distribusi zakat berdampak positif dan substansial pada pertumbuhan ekonomi. Elastisitas jangka panjang variabel zakat berdampak positif dan substansial. Bukti nyata di Malaysia sepakat bahwa zakat dapat mempengaruhi kenaikan tingkat ekonomi, investasi, dan konsumsi. Sehingga model administrasi zakat Malaysia dan instrumen fiskal dapat mempengaruhi perekonomian padatingkat makro. Kebijakan fiskal tersebut dapat diterapkan di negara lain
12	Fatimah Said, Zarinah Yusof, Saad Mohd Said, Ahmad Farid Osman (2010) <i>IJ Ms</i> 17 (1), 1-18 (2010)	Foreign Investment, Government Expenditure, And Economic Growth In Malaysia	Pertumbuhan ekspor dan rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB adalah kekuatan pendorong meningkatkan peningkatan ekonomi di Malaysia. Investasi asing dan tahun sebelumnya, pertumbuhan pendapatan per kapita riil memberikan dampak positif, sedangkan pertumbuhan penduduk memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
13	Ahmad Syubaili Bin Mohamed, Amir Aiman Bin Ibrahim, Nurul Syuhada Binti Zaidi, Mohd Naim Bin Kamaruzaman (2019) <i>International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences</i> Vol. 9 , No. 6, June, 2019.	Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia	Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dan positif antara produk domestik brutodan zakat untuk tingkat pengangguran.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
14	Rajesh Gupta (2018) Quest International College, Pokhara University, Nepal	The impact of government expenditure on economic growth in Nepal	Terdapat korelasi positif antara variabel dependen pertumbuhan ekonomi dan prediktor seperti sektor pertanian, non pertanian, industri dan, jasa. Sedangkan, arus total dan pengeluaran berulang dan inflasi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi
15	Handson Banda, Hlanganipai Ngirande, Fortune Hogwe (2016) Journal Investment Management and Financial Innovations, Volume 13, Issue 2, 2016	The impact of economic growth on unemployment in South Africa: 1994-2012	Dampak positif jangka panjang pada penurunan angka pengangguran disebabkan GDP, BUG, dan REER, namun dampak negatif oleh LP. Kajian yang dilakukan menghasilkan saran kebijakan seperti halnya pemerintah Afrika Selatan mengalokasikan pengeluaran pada kegiatan yang dapat menstimulasi banyaknya lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel zakat mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan sehingga berdampak juga pada daya beli masyarakat untuk sektor konsumsi. Selain itu, variabel tersebut memiliki dampak multiplier pada pembangunan. Namun, zakat menjadi variabel yang sangat fundamental untuk berkontribusi pada perekonomian karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

BAB II

DASAR TEORI

BAB 2

LANDASAN TEORI

A. Dasar Teori

1. Teori Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro yaitu studi ekonomi yang mengkaji mengenai perilaku ekonomi secara keseluruhan. Dalam Islam, ekonomi makro mengacu pada disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah kebijakan perekonomian bentuk pengelolaan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Ekonomi makro memfokuskan pembahasan pada keputusan ekonomi yang berdampak pada perilaku konsumen guna menstimulus investasi, upah dan harga, penentu perubahan, banyaknya uang yang diedarkan, kebijakan fiskal/ moneter, tingkat suku bunga, anggaran, dan utang-piutang pemerintah.²⁰ Oleh sebab itu, pengkajian mengenai ekonomi makro dipusatkan pada berbagai masalah ekonomi dasar yang sebenarnya.

Indikator ekonomi makro meliputi pendapatan nasional yang menerangkan nilai-riil barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara yang biasa disebut produk domestik bruto (PDB).²¹ PDB adalah pendapatan, pengeluaran/investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih. PDB digunakan dalam penghitungan jumlah total barang serta jasa yang diperoleh dalam sistem ekonomi sebuah negara dengan waktu yang ditentukan. PDB pada Islam ditandai dengan parameter falah yaitu kesejahteraan dengan penambahan instrumen zakat dengan dasar sebuah sistem sosial, kemanusiaan, dan

¹⁹Hendri Hermawan Adinugraha, *Ekonomi Makro Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 2.

²⁰Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

²¹Husna Ni'matul Ulya, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teori Ekonomi Makro Konvensional Dan Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021).

moral Islam. Pada ekonomi Islam pendapatan negara dapat diukur dengan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendapatan nasional harus dapat menghitung sebaran penghasilan individu karena dalam ekonomi Islam kesejahteraan diutamakan, ekonomi Islam lebih mementingkan kebutuhan pokok dibandingkan dengan kebutuhan barang mewah.²²
- b. Pendapatan nasional harus dapat menghitung produksi disektor pedesaan karena dalam ekonomi Islam konsep pemerataan pendapatan harus terpenuhi.²³
- c. Pendapatan nasional harus dapat mengkuantifikasikan kemakmuran sebagai proporsi dari total konsumsi karena adanya kebutuhan kebutuhan pokok akan barang dan jasa secara efektif. Tingkat kebutuhan rumah tangga merefleksikan kesejah teraannya.²⁴
- d. Perhitungan pendapatan nasional sebagai tolok ukur dari kemakmuran sosial karena dalam ekonomi Islam pemasukan negara bukan hanya dari pajak melainkan zakat sebagai pemasukan lain dari suatu negara. Zakat sangat bermanfaat untuk pendayagunaan dalam mengentaskan kemiskinan.²⁵

Sebuah negara perlu memiliki hak penuh terhadap sumber pendapatan dan penghasilan serta kekuasaan untuk dapat melakukan kewajiban suatu negara. Kewajiban suatu negara diantaranya penyelenggaraan pendidikan, pendidikan moral, menjaga keadilan, menegakan hukum serta melindungi seluruh kepentingan masyarakat baik secara spirtual dan material. Ibnu Taimiyah dalam tulisannya menjelaskan, pendapatan suatu negara bersumber dariharta rampasan perang (ghanimah) dan zakat .²⁶

Pada model konsumsi golongan Mustahiqsebuahnegara memiliki fungsi utama untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup minimal golongan Mustahiq. Zakat menjadi sumber utama atau sebagian sumber konsumsi golongan ini. Baitul Mal dalam konsep ekonomi Islam merupakan institusi negara dengan

²²Moh. Faizin, *Buku Ajar Ekonomi Makro Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 60.

²³Handi Risza Idris Mustafa Edwin Nasution dan Ranti Wiliasih Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 30.

²⁴Faizin, *Buku Ajar Ekonomi Makro Islam*.

²⁵Adinugraha, *Ekonomi Makro Islam*.

²⁶Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Terjemahan Oleh Ansyari Thayib*.138-144.

tugas menjalankan fungsi negara untuk menyalurkan kekayaan yang bersumber dari kelompok Muzakki untuk diberikan kepada orang-orang Mustahiq.

Masyarakat Islam yang telah terpenuhi kebutuhan hidup minimalnya diharapkan akan mampu memenuhi segala perintah Allah SWT dengan leluasa dan tanpa merasakan hambatan yang kemungkinan diluar batasan dirinya.

Zakat akan menggerakkan roda ekonomi untuk terus bergerak dengan tingkat minimum. Hal ini disebabkan terjaminnya konsumsi utama masyarakat oleh negara dengan menggunakan Baitul Mal yang memanfaatkan akumulasi zakat dari kelompok Muzakki. Dr. Metwally menjelaskan keberadaan Zakat memberikan dampak positif pada perekonomian. Hal ini disebabkan keberadaan zakat meningkatkan jumlah investasi dan konsumsi, selain itu zakat ikut berkontribusi mengurangi penimbunan harta pada suatu golongan. Zakat yang juga berperan dalam mendorong investasi akan menyebabkan harta tidak akan habis hanya untuk konsumsi. Sehingga zakat ikut berperan dalam meningkatkan makro ekonomi.

Berdasarkan analisis makro ekonomi, variabel konsumsi barang dan jasa adalah variabel yang memberikan nilai positif untuk pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pada saat kondisi ekonomi terhambat (stagnan) yang diakibatkan menurunnya konsumsi masyarakat atau mungkin mengalami keadaan *under consumption*, kebijakan utama yang dapat dipilih adalah untuk mendorong bergeraknya perekonomian dengan menambah daya beli masyarakat. Kekuatan daya beli penduduk dapat dikatakan merupakan target utama pada tiap keputusan ekonomi.

Zakat memiliki efek yang positif terhadap tingkat investasi dan simpanan. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Monzer Kahfi. Kenaikan jumlah tabungan yang didorong oleh meningkatnya pendapatan juga akan menyebabkan peningkatan jumlah investasi. Hal ini disebabkan adanya perintah untuk membebaskan zakat pada tabungan yang melebihi ambang batas minimum zakat (nisab). Sehingga Investasi tentu saja menjadi salah satu cara bagi Muzakki untuk menjaga nilai kekayaannya. Hal inilah yang akan meningkatkan jumlah investasi. Seperti telah diketahui sebelumnya investasi adalah bagian yang berperan besar dalam membangun perekonomian sebuah negara. Monzer Kahf menjelaskan adanya zakat secara tidak langsung berperan dalam turunya resiko kredit/pembiayaan macet yang biasa

dikenal dengan NPF. Hal ini disebabkan alokasi dana zakat salah satunya adalah untuk membantu orang-orang yang memiliki hutang. Selain itu juga secara jelas, zakat ikut berperan menurunkan tingkat pengangguran.²⁷

Manfaat lain dari sistem zakat adalah dapat menurunkan tingkat pengangguran menggunakan beberapa jalan. Pertama, penerapan zakat itu tentunya akan butuh tenaga kerja untuk mengelolanya. Selanjutnya, golongan Mustahik yang kesulitan secara ekonomi akan meningkat secara finansial. Hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Ketiga, munculnya *multiplier effect* pada badan usaha yang menjadi pendukung zakat dan akan meningkatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja.

Zakat, menurut Umer Chapra, adalah kebijakan kemandirian sosial yang diilhami perintah agamadengan dirancang untuk menolong orang fakir-miskin yang belum mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, zakat akan mampu menghasilkan dampak positif untuk negara, contohnya sebagai sumber investasi. Penyaluran zakat tentunya menyebabkan pemberi zakat untuk terdorong mencari pendapatan lain untuk membayar zakat dengan tak mengurangi hartanya. Selain itu dalam Islam menimbun kekayaan adalah perbuatan tercela sebab dapat menghambat peningkatan kemakmuran dan jumlah investasi.²⁸

2. Pendapatan Nasional Islam

Penghilangan kontribusi sektor sosial ekonomi sebagai model yang fundamental dari ekonomi makro konvensional. Perhitungan pendapatan nasional menjadi kurang realistis dan terbatas. Ekonomi konvensional telah mengecualikan sebagian masyarakat dari kebijakannya. Ekonomi Islam menghadirkan paradigma fundamental ekonomi makro guna memperoleh formulasi perhitungan pendapatan nasional yang lebih akurat. Paradigma tersebut mampu mencakup semua kalangan masyarakat, karena pelaku ekonomi domestik tidak hanya mencakup tiga aspek dalam perekonomian, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial masyarakat.

²⁷Monzer Kahf, *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century* (Kuala Lumpur-Malaysia, 1999).127.

²⁸M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).128.

Model ini tidak hanya memiliki empat akun-T dalam paradigma ekonomi tersebut, tetapi juga deskripsi akun-T ini lebih spesifik. Distribusi pendapatan (Y) di sektor rumah tangga tidak hanya terbatas pada perpajakan, tabungan, dan konsumsi tetapi juga pada zakat dan biaya sosial.

Zakat yang dikumpulkan dari sektor rumah tangga didistribusikan kepada penerima (mustahiq) melalui lembaga amil zakat guna memberikan pendapatan untuk sektor sosial. Demikian pula, pengeluaran sosial sektor rumah tangga disumbangkan ke lembaga nirlaba dan sosial.²⁹

Tiga sumber pendapatan negara, menurut Ibnu Taimiyah, adalah, fa'i, sedekah (zakat), dan ghanimah. Istilah ghanimah (rampasan perang) mengacu pada properti yang diambil dari orang-orang kafir melalui perang. Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyah, sedekah mengacu pada zakat yang berasal dari beberapa aset umat Islam tertentu. Zakat hasil bumi yaitu sepersepuluh (nisful-ushr) yang bersumber dari panen buah-buahan dan tanaman lainnya, zakat ternak seperti domba, sapi, dan unta, zakat berupa barang dagang, dan zakat yang berasal dari logamberharga yaitu perak dan emas.³⁰

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai pembayaran zakat. Mazhab Hanafi menerima pembayaran zakat tunai tanpa syarat. Sedangkan mazhab Syafi'i menolak menerima pembayaran zakat secara tunai. Dalam skenario ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pelunasan zakat dalam bentuk barang lebih dapat dimanfaatkan, akan tetapi tergantung pada konteks sosial, karena pembayaran tunai mungkin lebih bermanfaat.³¹

Pos-pos pengeluaran negara yang tidak bersumber dari uang dari ghanimah atau zakat semuanya ditetapkan sebagai kebijakan ekonomi sebuah negara. Ibnu Taimiyah menjelaskan, tujuan utama dari distribusi fa'i adalah untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat yang berhadapan dengan serangan baik dari luar ataupun dalam negeri, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.³²

²⁹Muhammad Dumairy, Syamsul Hadi, "Model Perhitungan Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal CMES Volume XI Nomor 2 Edisi Juli Program Studi Sastra Arab FIB UNS Surakarta* (2018), 181-182.

³⁰Taimiyah Ibnu, *Majmu' Fatawa Shaikh AllIslam* (Riyad: Matabi al-Riyad, 1963), 567.

³¹Ibid. 46.

³²Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Terjemahan Oleh Ansyari Thayib*. 277.

Pendapatan fa'i secara konkrit, dimanfaatkan untuk mendanai anggaran pertahanan dan keamanan, serta membiayai kebutuhan para janda dan anak-anak yang disebabkan perang. Selanjutnya, fa'i juga digunakan untuk melunasi gaji para penjaga, termasuk diantaranya polisi dan penjaga keamanan dari masyarakat, serta untuk membiayai pegawai pemerintah daerah. Jika fakir miskin tidak mendapatkan anggaran yang cukup dari zakat dan ghanimah, kelompok ini dapat dibantu dengan menggunakan fa'i. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Pemasukan dari fa'i juga dimanfaatkan untuk membiayai hal lain diantaranya untuk gubernur, pejabat pemerintah, dan pejabat, serta membayar gaji hakim, menyediakan fasilitas pendidikan, dan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur publik seperti jembatan, kanal, dan jalan.³³

3. Ketenagakerjaan dalam Islam

Terdapat 4 prinsip pada ketenagakerjaan dalam Islam yakni:³⁴

- a. Manusia yang merdeka dalam ajaran Islam dicontohkan oleh Nabi Muhammad (SAW), yang secara jelas menyatakan sikap menolak perbudakan agar terbentuk masyarakat yang memiliki sikap adil dan toleran. Ajaran Islam sangat menolak adanya perbudakan dengan berbagai bentuk. Terdapat juga praktik penjualan karyawan yang mengabaikan hak-hak pekerja sehingga melanggar prinsip kemanusiaan. Manusia yang merdeka dimaksudkan untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang dari para pengusaha. Hal ini disebabkan pekerja juga memiliki hak asasi manusia yang tak dapat diganggu. Dalam situasi ini, pemilik perusahaan akan dipaksa untuk memperkerjakan seseorang tanpa mengganggu kemerdekaannya dan di luar kemampuannya.
- b. Harkat dan martabat manusia dalam Islam ditempatkan pada posisi yang terhormat, apapun pekerjaannya, karena seorang Muslim yang gigih dalam hidupnya sebagai ajaran dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah (62:10):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³³Taimiyah Ibnu, "Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam," *Matabi al-Riyad* 28 (1963), 562-567.

³⁴Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 157.

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Kemuliaan seseorang yang bekerja dapat terefleksi dari kontribusinya bagi pihak lain. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits yakni “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵ Hal ini menyebabkan, terlepas dari bidang pekerjaannya, seseorang harus menghargai dan menghormati orang lain, terutama hubungan antara pengusaha dan karyawan. Hal ini karena dalam berwirausaha saling membutuhkan satu sama lain, dengan karyawan menjalankan roda bisnisnya dan diberi kompensasi atas usahanya.

- c. Prinsip keadilan sangat fundamental bagi manusia karena dapat menumbuhkan rasa hormat dan memberikan individu hak-hak yang sesuai dengan upayanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid (57:25) :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”

Pada ayat diatas Allah SWT menyatakan bahwa para Rasul-Nya diutus dengan bukti yang jelas dan pesan yang jelas dengan disampaikan melalui perantara para malaikat-Nya. Meskipun dalam ayat tersebut diucapkan dalam bentuk mufrad, namun arti

³⁵Thohir Luth, *Antara Perut Dan Etos Kerja, Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

yang dimaksud jamak yakni al-kutub (keadilan). "Keadilan" yang dijelaskan adalah suatu tatanan yang menuntut orang untuk berlaku adil satu sama lain dengan menjaga hak dan kewajibannya. Lafazh berikutnya membahas menolong agama Allah. Ibnu Abbas r.a. menjelaskan interpretasinya mengenai orang yang menolong agama Allah meskipun mereka tidak melihat-Nya. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yang berarti Allah SWT tak membutuhkan bantuan apa pun dari makhluknya. Akan tetapi, manfaat dari tindakan ini akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya. Prinsip keadilan yang diterapkan yakni adil dalam memberikan kompensasi kepada karyawan atas pekerjaannya, adil dalam memilih pekerja yang cocok sesuai kemampuannya, dan keadilan dalam memenuhi semua tugas, bekerja dengan tekun serta jujur dengan kemampuan terbaiknya sesuai dengan perjanjian kerja.

- d. Transparansi pengupahan dalam Islam sangat memperhatikan kejelasan akadnya (perjanjiannya) karena sebagai aspek fundamental dalam kehidupan. Setiap mukmin wajib melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, baik dalam hal pekerjaan, kompensasi, maupun jam kerja. Dalam akad ini, kontrak antara pekerja dan pengusaha harus jelas secara eksplisit yang menguraikan mengenai tugasnya, kompensasi yang harus dibayar, dan waktu dibayarkannya. Dengan kejelasan akad ini, diharapkan tidak ada permasalahan untuk selanjutnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

4. Pertumbuhan Ekonomi

Fluktuasi kondisi ekonomi dari waktu ke waktu pada periode tertentu adalah definisi dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dapat tumbuh ketika adanya peningkatan pendapatan per *kapita* serta adanya kecakapan pada pengelolaan sumber daya alam secara efektif.³⁶

Produk Domestik Bruto (PDB) ialah “indikator utama dalam konsep ekonomi makro yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi”. PDB merupakan nilai pasar dari semua produk dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Produk Domestik Bruto, dalam konsep regional juga dikenal dengan “Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB”. PDRB adalah indikator ekonomi makro yang mencerminkan ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut Saggaf, “Kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat diketahui dengan penghitungan secara cermat dan akurat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan, yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang terbentuk dari peningkatan produksi pada berbagai sektor usaha”.³⁷

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Selain itu, pengaruh kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); modal (melalui tabungan dan investasi), tenaga kerja (perubahan jumlah tenaga kerja), dan kemajuan teknologi merupakan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.³⁸

³⁶Jeni Palindangan and Abu Bakar, “Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika,” *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)* 5, no. 1 (2021), 66.

³⁷Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 91.

³⁸Neli AGUSTINA and Setia PRAMANA, “The Impact of Development and Government Expenditure for Information and Communication Technology on Indonesian Economic Growth,” *Journal of Business Economics and Environmental Studies* 9, no. 4 (2019): 5–13.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai bagian dari pembangunan ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan bertambahnya jumlah faktor produksi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam Islam, berdasarkan pemahaman ini. Apabila suatu produksi jasa atau produk mengandung komoditas yang terbukti berdampak negatif dan membahayakan masyarakat, peningkatan faktor produksinya tidak dapat dianggap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁹

Dalam konteks ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang bertambahnya volume komoditas dan jasa, tetapi juga tentang aspek akhlak dan moral, serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Pertumbuhan ekonomi diukur tidak hanya dari pencapaian moneter, tetapi juga dalam peningkatan kehidupan keagamaan, sosial, dan masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan mengakibatkan berkurangnya nilai-nilai seperti keadilan dan kemanusiaan, jelas pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi Syariah, setidaknya terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya yang dapat diinvestasikan (*Investible resources*), SDM, dan teknologi serta inovasi.⁴⁰

5. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja melalui proses rekrutmen. Kesempatan kerja dalam arti luas dapat diartikan sebagai persentase berubahnya kebutuhan tenaga kerja yang setara dengan perubahan 1% dalam upahnya.

Esmara mengungkapkan bahwa kesempatan kerja yakni peluang individu untuk menemukan pekerjaan dan diterimanya dalam pekerjaan tersebut. Apabila terjadi peningkatan orang yang bekerja, maka semakin luas kesempatan kerjanya. Sementara Sagir menjelaskan kesempatan kerja sebagai peluang pekerjaan yang telah tersedia

³⁹Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).237.

⁴⁰Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2016).23.

sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dan keterlibatannya dalam pembangunan.⁴¹

Kesempatan kerja ialah sebuah keadaan yang menggambarkan tersedianya lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Konsep kesempatan kerja memiliki pengertian lapangan kerja dan kesempatan kerja yang muncul sebagai akibat adanya kegiatan ekonomi (produksi). Oleh karena itu, kesempatan kerja ialah pekerjaan yang telah terisi dan yang masih kosong. Kesempatan kerja mencakup lapangan kerja yang masih belum terpenuhi. Adanya kebutuhan tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaan kosong ini (ada peluang) akan menyebabkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja.⁴²

Secara teori, terdapat tiga pendekatan untuk meningkatkan kesempatan kerja pada prospek bisnis jangka panjang. Pertama, membatasi laju pertumbuhan penduduk, yang diperkirakan akan menghambat pertumbuhan di sisi jumlah tenaga kerja. Pilihan kedua adalah meningkatkan produktivitas pekerja dengan meningkatkan intensitas output mereka. Namun, strategi ini tidak selalu berhasil dalam jangka panjang karena belum tentu bermanfaat bagi kemajuan ekonomi jangka panjang dan pilihan terakhir adalah pertumbuhan ekonomi.⁴³

6. Investasi

Investasi yaitu penanaman modal pada instrumen tertentu sebagai aset bersih dalam bidang ekonomi. Investasi bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni riil dan keuangan. Investasi riil didefinisikan sebagai investasi dalam bentuk aset jangka panjang yang digunakan dalam proses manufaktur. Sedangkan investasi keuangan yaitu penanaman modal pada instrumen surat berharga, seperti obligasi, saham, dan bentuk surat hutang. Kegiatan ini merupakan upaya guna mengembangkan atau meningkatkan pendapatan dan kapasitas produksi di masa depan. Tujuan utama dari investasi yakni untuk mengisi kembali persediaan modal. Adanya investasi di suatu daerah, baik asing (PMA) maupun lokal (PMDN),

⁴¹G R Andini, "Jurnal Pendidikan Untuk Semua Tahun," *Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2021), 20.

⁴²Tambunan Tulus, *Transformasi Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 33.

⁴³Kasyful Mahalli, "Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan," *jurnal perencanaan & pengembangan wilayah* 3, no.3 (2008): 127.

akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja sehingga produktivitas dan perekonomian mampu meningkat.⁴⁴

Investasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi, dan mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, investasi meningkatkan ekspor dan menggantikan impor, meningkatkan neraca pembayaran. Selain itu, pengambil keputusan memahami bagaimana fluktuasi investasi mempengaruhi kinerja ekonomi. Oleh karena itu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investasi sangat penting bagi perekonomian.⁴⁵

Menurut Syafi'i Antonio,⁴⁶ dalam hal definisi terdapat perbedaan mendasar antara berinvestasi dengan mengembangkan tabungan dengan bunga simpanan. Investasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena mengandung unsur ketidakpastian, sehingga memberikan hasil yang tidak dapat diprediksi dan tidak stabil. Bunga uang, di sisi lain, adalah kegiatan komersial yang kurang berisiko karena pengembalian dalam bentuk bunga lebih dapat diprediksi dan tetap.

Hal ini menyebabkan ajaran Islam sangat menolak perilaku membungakan uang serta termasuk dalam riba. Ajaran Islam mendorong masyarakat produktif dan berusaha secara riil dengan cara berinvestasi. Berdasarkan penjelasan di atas, menabung uang di Bank Islam masuk dalam kategori kegiatan investasi karena mendapatkan kembalian (*return*) dari waktu ke waktu dengan jumlah tak pasti. Besar kecilnya nilai *return* sangat tergantung pada bagaimana hasil usaha yang benar-benar dilakukan oleh pihak pengelola dana (Mudharib) atau Bank Islam. Bank Islam sudah seharusnya tidak hanya menjadi pihak yg mengalirkan uang. Bank Islam diharuskan terus berupaya meningkatkan *return* agar bank Islam menjadi menarik dan memberi rasa percaya bagi pemilik

⁴⁴ Hellen, Sri Sri Mintarti, "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja The Influence of Investment and Labor and Government Spending on Economic Growth and Employment" 13, no. 1 (2017): 28–38., (2017), 31.

⁴⁵ Ziad Mohammad ABU-LILA, "Determinants of Investment in the Jordanian Productive Sectors," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 4 (2021): 635–641.

⁴⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).59.

dana.⁴⁷Peningkatan ini tidak diperbolehkan melalui jalan yang melanggar batasan normasyari'ah diantaranya adalah seperti praktik riba, zulm, maysir, dan gharar.

Diperlukan beberapa prinsip agar tidak masuk ke praktik investasi non-islami.⁴⁸ Beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dan dasar bagi para penanam modal/investor diantaranya, menghindari mencari rizki dengan jalan yang haram, baik dari segi substansi maupun pekerjaannya, dan juga tidak menggunakan rezeki yang didapatkan untuk hal haram, tidak melakukan perbuatan dan menerima perbuatan dzalim, adil dalam mengalirkan pendapatan, ridha sama ridha (an-taradin) pada tiap transaksi yang dilakukan, tidak memiliki kandungan riba/maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (samar-samar).⁴⁹

Dari uraian di atas, sudah cukup jelas bahwa Islam sangat menganjurkan untuk berinvestasi, namun tidak semua bidang usaha diperbolehkan untuk digunakan sebagai instrumen investasi. Peraturan-peraturan sebelumnya mendefinisikan apa yang legal atau diperbolehkan, serta apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya agar manusia terhindar dari melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.⁵⁰ Hal ini menyebabkan segala bentuk investasi wajib mengikuti kepada hukum yang telah disyariatkan. Perputaran modal investasi tidak boleh dialihkan ke industri yang melakukan kegiatan haram, seperti membeli saham di pabrik minuman keras dan hal-hal yang diharamkan. Segala transaksi padapasar saham, harus bersifat ikhlas, tanpa adanya paksaan, tanpa ada pihak yang merugikan atau dirugikan, tidak mengandung riba, spekulasi, atau judi, dan maysir. Segala transaksi harus transparan dan adanya insider trading harus dilarang.⁵¹ Itulah beberapa hal yang patut untuk diikuti para penanam modal agar uang yang diinvestasikan menerimarahmat dari Allah, serta menjadi manfaat bagi masyarakat agar tercapai falah (sejahtera lahir-batin) untuk dunia dan akhirat.

⁴⁷Ibid, 60.

⁴⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).91.

⁴⁹Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*.16.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.17.

7. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan pembangunan pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dikerjakan pada waktu tertentu ditentukan oleh faktor-faktor berikut: a) penerimaan pajak yang dikumpulkan, b) untuk kegiatan ekonomi padatenggat waktu pendek, c) tujuan pembuatan infrastruktur ekonomi tenggat waktu panjang, serta d) penjagaan situasi politik dan keamanan.⁵²

Konsep yang dirancang oleh Rostow dan Musgrave menjembatani alokasi dana pemangku kekuasaan dengan tiga fase pembangunan ekonomi yang berbeda: awal, sedang, dan lanjut. Pada fase awal pertumbuhan ekonomi, porsi pemerintah dari total investasi tinggi karena pemerintah harus mendanai infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Adanya konflik sosial berakibat pada pemusatan aktivitas pemerintah pada sebagian aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh pihak swasta (*concentration-effect*) dan efek inspeksi yang timbul sebagai akibat dari kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang memerlukan perhatian pemerintah setelahnya hingga permasalahan ini teratasi.⁵³

Pengeluaran pembangunan yaitu anggaran yang digunakan mendanai pembangunan ekonomi, sosial, dan umum, serta yang dilakukan untuk menumbuhkan modal publik melalui pembangunan infrastruktur baik non-fisik dan fisik dalam periode yang ditentukan. Pengeluaran untuk pembangunan fisik dan non-fisik terus-menerus diubah sebagai tanggapan atas dana yang terkumpul. Pengeluaran tersebut selanjutnya diberikan kepada disiplin ilmu lain sesuai dengan urgensi yang ditetapkan. Fungsi pengeluaran fisik lebih dititikberatkan untuk usaha memberikan keadaan yang kondusif dan stabil bagi keberlangsungan restorasi ekonomi sekaligus menjadi penggerak tumbuhnya ekonomi nasional. Pencapaian tujuan pembangunan harus dikerjakan seefisien mungkin karena terbatasnya sumber dana yang ada.

Prinsip pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari Produk Nasional Bruto (PNB) dijelaskan lebih lanjut oleh aturan Wagner, yang menyatakan bahwa ketika pendapatan per

⁵²Herispon Herispon, Sekolah Tinggi, And Ilmu Ekonomi, "Buku Ajar Ekonomi Makro (Buku II)," No. July (2018), 5.

⁵³Hellen, Sri Mintarti, Fitriadi "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan."(2017), 31.

kapita tumbuh, pengeluaran pemerintah meningkat secara proporsional.⁵⁴

Dalam islam efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran Islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi Islam, serta dijadikan kaidah rasionalitas bagi pengeluaran Negara. Menurut Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra Enam kaidah tersebut adalah:

- a. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
- b. Penghapusan kesulitan dan kerugian harus di dahulukan dari pada penyediaan kenyamanan.
- c. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus di dahulukan dari pada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit.
- d. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
- e. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.
- f. Sesuatu hal yang wajib ditegakan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.⁵⁵

Kaidah-kaidah diatas dapat membantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Diantara tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam:

- a. Pengeluaran demi memenuhi hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.

⁵⁴Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: . LPFE-UI, 2006).72.

⁵⁵Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi ; Sebuah Tinjauan Islam, Alih Bahasa :* Ikhwan Abidin (Jakarta: Basri, Gema Insani Pers dan Tazkia Institute, 2000).285.

- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.⁵⁶

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah harus didistribusikan untuk kepentingan yang paling utama dan esensial. Penggunaan pendapatan negara harus didistribusikan untuk keperluan rakyat (masalah).⁵⁷ Hal tersebut ditonjolkan oleh Ibnu Taimiyah dalam hal pemasukan negara, di mana penyelenggaraannya dikelola oleh pemerintahan sepenuhnya dengan segala keputusan berada di tangan penguasa yang merupakan pemimpin negara. Seorang pemimpin suatu negara harus melakukan strategi penyaluran yang sangat baik dan berlandaskan perintah yang tertuang pada Al-Qur'an.

Seorang yang bertugas mengelolapendapatan ngearatidak diperbolehkanmenyalurkan pendapatan negara tanpa tuntunan dari Al-Qur'an dan dilakukan sesuka hati.⁵⁸Hal ini berbeda karena danayang dimiliki oleh properti pribadi dapat disalurkan kepada publik dengan mudah. Para pengelola dana hanya bertanggung jawab, mengatur, dan yang mendapatkan mandat sebagai pengelola keuangan negara, bukan pemilik dana tersebut. Lebih jauh lagi Ibn Taimiyah menuangkan bahwa kepala negara setara dan tak lebih spesial dibandingkan penduduk biasa.⁵⁹ Ibn Taimiyah juga secara jelas tidak memperbolehkan suap. Suap adalah suatu yang diberikan seseorang kepada penguasa dengan berharap suatu balasan tertentu. Ibn Taimiyah juga secara tegas menolak segala pengeluaran pendapatan nasional yang disalurkan untuk hiburan yang berlebihan, terlebih lagi untuk perjudian dan prostitusi.⁶⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, pengeluaran terpenting dari pendapatan publik ialah: Pertama, untuk para pasukan yaitu mereka yang bergerak untuk memperjuangkan Islam dan melindungi negara dan para pejuang memiliki hak atas sebagian dari harta yang dikumpulkan negara. Kedua, untuk pemerintah dan dana pensiun. Pendapatan

⁵⁶ Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusife Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007).224.

⁵⁷Abdul Azim Islahi, "Economic Concepts of Ibn Taimiyah," in *Islamic Foundation* (London: Islamic Foundation, 1988).211.

⁵⁸Ibn Taimiyah, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlahi Ra'i Wa Ri'ayah" (Damaskus: Darul Bayan, 1966).57.

⁵⁹Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, 213.

⁶⁰Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlahi Ra'i Wa Ri'ayah*, 60.

negara dapat digunakan untuk menggaji dan memberi dana pensiun untuk hakim, gubernur, pengajar, dan yang lain. Ketiga, digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmiah, dan beasiswa. Keempat, dimanfaatkan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan saluran irigasi. Kelima, disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berada pada golongan fakir miskin. Terakhir, dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan seluruh masyarakat.⁶¹

Pengeluaran negara dibagi menjadi dua kategori oleh Ibnu Taimiyah: Yang pertama adalah untuk anggaran pertahanan negara. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk anggaran perlindungan kehidupan sosial masyarakat dari serangan eksternal dan internal. Pada saat Ibnu Taimiyah hidup, anggaran pertahanan dimanfaatkan untuk menahan serangan tentara Mongol dan tentara salib. Hal ini menyebabkan ia menempatkan prioritas cukup besar pada pengeluaran yang digunakan untuk pasukan dan pasukan tambahan. Pasukan serta pasukan tambahan menerima fa'i selain zakat dan ghanimah. Pasukan ini merupakan garda pertama yang memperoleh pemasukan atau penerimaan negara, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Pendapatan negara juga akan digunakan untuk membantu janda korban perang (janda tentara) dan anak-anaknya.⁶²

Ibn Taimiyah juga menekankan pada perdamaian dan keamanan internal. Pendapatan fa'i seharusnya dimanfaatkan untuk melunasi gaji para penjaga.⁶³ Selanjutnya, untuk anggaran jaminan sosial, Ibn Taimiyah menjelaskan jaminan sosial seharusnya berada pada prioritas atas untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ibn Taimiyah memberi saran apabila zakat dan ghanimah belum mencukupi bagi mereka yang fakir miskin, diperlukan dukungan dari pendapatan fa'i. Pada dasarnya hal ini dilakukan untuk menjadi pemenuh kebutuhan minimal mereka. Pengeluaran untuk kesejahteraan sosial, tak hanya berbentuk pengeluaran konsumtif, akan tetapi dapat berbentuk pengeluaran produktif dan tetap bertujuan untuk kepentingan publik. Pengeluaran dapat digunakan untuk pelayanan publik ataupun untuk pembangunan infrastruktur antara lain: 1). Anggaran untuk para pejabat negara serta pengeluaran tidak terduga. 2). Anggaran untuk menjaga keadilan negeri. Menurut Ibn Taimiyah, suatu negara berperan penting dalam mengatur gaji untuk hakim dan qadi yang

⁶¹Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, 213.

⁶²*Ibid*, 217.

⁶³Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlahi Ra'i Wa Ri'ayah*, 217.

berasal dari keuangan kas negara. 3). Digunakan untuk menolong orang-orang yang menjadikan negara menjadilebih baik, seperti mereka yang terlibat dalam belajar-mengajar dan untuk orang yang bekerja urusan agama atau mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, sudah sepatutnya negara menyediakan fasilitas dan mendukung mereka. 4). Dianggarkan untuk prasarana publik, infrastruktur dan tugas ekonomi seharusnya tidak dibebankan kepada individu atau para pemilik usaha. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa segala infrastruktur baik itu kanal, jembatan ataupun jalan dan lainnya harus dibangun oleh pemerintah menggunakan pendapatan fa'i.

Berbagai penjelasan sebelumnya hanyalah sebagian daftar anggaran untuk pengeluaran publik dan ini masih jauh dari lengkap. Secara umum, uang fa'i sudah sewajarnya dimanfaatkan untuk segala jenis proyek kesejahteraan seperti: tunjangan anak, kesehatan masyarakat, dana pensiunan, dan beragam bantuan sosial lainnya, promosi industri, subsidi, dan transportasi, pos, serta perdagangan seharusnya dianggarkan cukup signifikan diantara kepentingan lain, dengan pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur prioritasnya. Secara prinsip prioritas Ibn Taimiyah adalah menyediakan anggaran untuk bagian yang paling penting lalu selanjutnya turun ke prioritas yang kurang penting, dengan preferensi untuk pengeluaran produktif daripada pengeluaran tidak produktif. Jumlah pendapatan dari zakat yang tidak mencukupi untuk membayar pengeluaran pemerintah dan pendapatan fa'i yang tidak meninggalkan kelebihan untuk kas negara akan mendorong pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan.⁶⁴

8. Zakat

Zakat berakar dari kata (masdar) zakat, yang berarti bersih, baik, dan tumbuh.⁶⁵ Apabila seseorang menerima zakat, maka hal itu diharapkan dapat menjadikannya tumbuh lebih baik. Hal tersebut menyebabkan, seseorang yang memberi zakat dapat dipandang sebagai orang yang telah diberkahi, bertumbuh, baik, dan bersih. Hal ini telah dijelaskan dengan baik didalam Al-Qur'an ataupun Hadits. Penggunaan kata zakat dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan beberapa hal seperti, "Tumbuh dan berkembang (Surat Al-Kahfi (18):81), suci atau bersih hati (QS

⁶⁴Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, 217-218.

⁶⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 34-35.

Maryam (19):13), suci dari kemungkaran (QS An-Nur (24):21), dan mensucikan (Surat At-Taubah (9):103)”.⁶⁶

Zakat, secara syariah atau fiqh, dijelaskan sebagai sebagian dari harta yang diatur Allah SWT untuk disumbangkan kepada yang memiliki hak untuk mendapatkan. Zakat dikeluarkan dari sebagian harta. Menurut Imam Nawawi zakat akan bermanfaat untuk melindungi harta seseorang dari kehilangan ataupun kerusakan. Menurut Ibnu Taimiyah, pemberi zakat akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan juga berperan dalam membersihkan harta. Zakat bertujuan untuk menumbuhkan dan menyucikan pemberi zakat, bukan hanya harta benda yang dizakatkan. Zakat, di sisi lain juga akan meningkatkan kemampuan penerima dan mensucikan jiwanya. Pengertian zakat menurut berbagai pandangan ulama fiqhyaitu: seseorang yang wajib mengeluarkan harta dengan nominal dan cara yang ditetapkan.⁶⁶

Zakat berarti berkah, kesuburan, kebersihan, dan kebaikan dalam bahasa Arab. Sedangkan zakat dapat diartikan sebagai harta atau makanan pokok yang harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan yang bersumber dari seseorang. Zakat memiliki unsur manfaat dan keberkahan, sehingga akan menjadikan harta pemberi zakat menjadi tumbuh dan suci berkembang. Seorang pemeluk agama islam yang telah mengumpulkan harta kekayaan dan telah tercapai nisabnya, termasuk untuk anakdibawah umur, wajib mengeluarkan zakat. Orang yang tidak waras dan bersama walinya wajib mengeluarkan zakat jika ia memiliki harta dan telah mencapai nisab. Demikian pula jika seseorang meninggal dunia tanpa sempat membayar zakat, maka ahli warisnya wajib membayar zakat tersebut sebelum harta tersebut diterimanya.⁶⁷

Dalam istilah fiqh, zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dibagikan kepada mereka yang berhak. Sementara itu, menurut beberapa aliran mazhab terdapat perbedaan definisi zakat.

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai “Kegiatan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki khususnya harta yang telah sesuai dengan ukuran nishab (batas kuantitas

⁶⁶Bank Indonesia, *Seri Ekonomi Dan Keuangan (Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara)* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), 58.

⁶⁷Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2013), 244.

- minimal yang mewajibkan zakat) untuk diserahkan kepada mereka yang berhak”.
- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai pemberian sebagian harta yang spesifik kepada seseorang yang spesifik, dengan ketentuannya sesuai syariat dan disampaikan karena Allah SWT.⁶⁸
 - c. Menurut mazhab Syafi’i “Zakat adalah sebuah ungkapan dikeluarkannya sebagian harta atau dapat dijelaskan sebagai cara tumbuh yang dengan cara khusus dan sesuai”.
 - d. Menurut mazhab Hambali, “Zakat adalah hak berupa harta yang harus dikeluarkan dari keseluruhan harta, yang ditujukan spesifik kepada kelompok yang telah disyariatkan, yaitu kelompok yang telah diatur di dalam Al-Qur’an”.

Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadits yang isinya adalah, suatu saat Nabi Muhammad menugaskan Mu’az bin Jabal untuk pergi ke Yaman dengan tugas menjadi gubernur dan mewakili beliau di sana. Nabi menjelaskan dan menegaskan pada Mu’az bin Jabal bahwa zakat merupakan harta yang dikumpulkan dari mereka yang kaya untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, diantaranya adalah mereka yang fakir dan miskin.⁶⁹

Zakat adalah sesuatu yang wajib bagi umat Islam yang mampu. Zakat berarti mengambil sebagian harta dari mereka yang mampu dan menyalurkannya kepada mereka yang tidak mampu. Setiap tahun, tanggung jawab ini dipenuhi sebagai harta untuk kemanusiaan dari agamayang bersumber dari orang-orang yang berada untuk membantu orang lain melewati kesulitan hidup mereka dan menafkahi mereka yang tidak memiliki harta.

Zakat ialah ibadah yang terdiri dari dua arah, yakni keatas (vertikal) dan kesamping (horizontal). Zakat ialah ibadah yang didalamnya terdapat nilai-nilai ketaatan terhadap perintah Allah SWT untuk menggapai ridha-Nya melalui hubungan dengan-Nya (hablum minallah) dan sebagai amal baik kepada manusia sekitar (hablum minannas). Zakat dapat dimaknai sebagai ibadah dalam bentuk kesungguhan yang berkaitan dengan harta (maaliyah

⁶⁸Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 6-7.

⁶⁹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, 1st ed. (Jakarta: UI-Perss, 2012), 39.

ijtihadyyah). Zakat memiliki fungsi yang terkait dengan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Fungsi keagamaan: berperan dalam mensucikan jiwa bagi mereka yang memberi zakat dari sikap tercela yang tidak disukai agama, diantaranya: pelit, bakhil dan egois.
- b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu menyalurkan suatu pertolongan untuk mengatasi kesulitan masyarakat dari bermacam-macam bagian. Serta mengurangi sikap-sikap yang terlalu mencintai harta benda dengan mendermakannya untuk orang lain yang mempunyai hak atas hartanya.
- c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian aset kepada badan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan pemerintahan, seperti menegakkan dakwah, syi'ar agama yang perlu dukungan oleh ekonomi, bantuan alam, dan bantuan ekonomi, serta mendorong pembangunan pemerintahan yang kuat dengan memanfaatkan uang zakat.

Kewajiban zakat adalah jalan yang paling utama untuk dapat mengurangi kesenjangan. Selain itu zakat juga dapat menjadi realisasi dari sifat gotong royong dan rasa kebersamaan sosial pada masyarakat. Zakat memiliki beberapa hikmah diantaranya yaitu:⁷⁰

- a. Zakat dapat menghilangkan sifat pelit dan kikir, sekaligus membiasakan orang yang menunaikannya untuk memiliki sifat dermawan.
- b. Zakat dapat menambah rasa kasih sayang dan cinta bagi sesama umat islam serta menguatkan benih persaudaraan.
- c. Zakat adalah salah satu usaha untuk menyelesaikan kemiskinan.
- d. Zakat akan berkontribusi menurunkan jumlah pengangguran dan mengurangi penyebabnya. Hal ini disebabkan, harta dari zakat dapat dimanfaatkan untuk membuat lapangan pekerjaan lebih luas.⁷¹
- e. Menimbulkan perasaan bahagia saat dapat membagikan sebagian harta karena Allah dan mendekatkan para mukmin kepada Allah.

⁷⁰Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 7th ed. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), 85-86.

⁷¹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 1st ed. (Yogyakarta: DIVA Perss, 2013), 17.

- f. Mengilhami orang-orang beriman untuk bersyukur kepada Allah karena telah menjaganya dari kesulitan ekonomidan memberinya hartayang banyak.⁷²
- g. Menyucikan harta, tujuan dari zakat adalah untuk menjaga kebersihan harta benda dengan mencegah masuknya harta milik orang lain ke dalam harta pemberi zakat. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan masuknya hak orang lain ke dalam harta pemberi zakat secara tidak sengaja.
- h. Membersihkan jiwa si pemberi zakat dari sifat buruk. Zakat akan berperan dalam membersihkan jiwa penderma dari kotoran hati termasuk didalamnya sifat kikir (bakhil) dan sifat dengki.⁷³

Berikut ini akan dijelaskan mengenai informasi tentang kelompok golongan yang memiliki hak untuk menerima, serta bagaimana zakat didistribusikan kepada masing-masing mustahik tersebut:

- a. Fakir, merupakan orang yang tak memiliki kemampuan finansial, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti sandang, pangan, dan papan.
- b. Miskin, Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau menjalankan usaha, tetapi penghasilan mereka hampir tidak dapat menutupi sebagian besar kebutuhan dasar mereka, baik untuk diri sendiri ataupun anak-anak mereka. Kedua golongan ini, menurut Jumbuh ulama, sebenarnya identik, yaitu sama-sama memiliki kesulitan finansial.
- c. Amil adalah orang yang bekerja untuk lembaga dan bertanggung jawab atas semua aspek pada zakat, termasuk didalamnya urusan pengumpulan, pencatatam, dan pendistribusiannya. Seorang yang termasuk kedalam amil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Muslim, mukallaf, (dewasa, berakal/cakap, adil, jujur, orang yang mengerti hukum-hukum zakat tentang perhitungannya, pembagiannya dan paham

⁷²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 103.

⁷³M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2008).19-22.

mengenai kategori mustahik serta orang yang wajib membayar zakat) dan dapat menjaga zakat.

- d. Mu'alaf, mu'alaf adalah individu yang diharapkan untuk meningkatkan kecenderungan hati mereka terhadap Islam atau menambah keyakinan mereka terhadap Islam, menghindari niat jahat mereka terhadap sesama muslim, atau harapannya dapat melindungi dan membantu umat muslim melawan musuh kaum muslimi. Kelompok mu'alaf ini diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, termasuk Muslim dan non-Muslim, sebagai berikut: yaitu: 1). Golongan yang baik kelompok dan individu-nya diharapkan keislamannya. 2) Golongan yang ditakuti berniat jahat. 3) Golongan yang baru memeluk Islam. 4) Tokoh masyarakat atau pemimpin yang baru masuk Islam dan memiliki sahabat dari orang kafir. 5) Tokoh Muslim atau pemimpin muslim yang kuat pada kalangan kaumnya akan tetapi masih memiliki iman yang lemah. 6) Kaum muslim yang hidup di daerah perbatasan dengan musuh. 7) Kaum muslim yang bertanggung jawab untuk zakat para Mani' zakat (orang yang mau membayar zakat hanya ketika dipaksa).
- e. Riqab, seorang budak mukatab (budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya apabila membayar sejumlah uang) Di mana hamba tersebut tidak memiliki uang untuk menebus kebebasannya.
- f. Gharimin, adalah mereka yang memiliki hutang yang tidak disebabkan maksiat kepada Allah. Hutang tersebut dihasilkan dari gagalnya usaha yang dilakukannya dalam menafkahi keluarganya.
- h. Fisabilillah, orang yang mujahid untuk berangkat perang dan menegakkan agama Allah. Golongan ini termasuk didalamnya orang yang belajar ilmu pengetahuan di jalan Allah. Golongan ini dapat memanfaatkan zakat untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan atau kebutuhan lain serta memenuhi kebutuhan peralatan perang dan belajar lainnya.
- i. Ibnu Sabil, merupakan individu yang melakukan perjalanan bukan untuk maksiat kemudian mengalami kehabisan bekal

pada perjalanannya. Zakat yang disalurkan adalah bentuk dari kepedulian dan bantuan sosial kemasyarakatan.⁷⁴

Terdapat juga beberapa orang atau kelompok yang haram atau tak berhak menjadi penerima zakat, diantaranya:

- a. Orang berharta banyak dan orang yang masih mampu dan mempunyai tenaga.
- b. Hamba sahaya atau budak masih menerima nafkah dan menjadi tanggungan tuannya.
- c. Keturunan Rasulullah (ahlul bait).
- d. Orang yang hidupnya ditanggung dari orang yang telah wajib zakat, contohnya istri dan anak.⁷⁵
- e. Orang-orang kafir dan mereka yang berperang dengan umat muslim, berdasarkan pendapat ulama kafir dzimmi menurut jumhur fukaha.⁷⁶

Agar distribusi memberikan signifikansi yang baik, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan dan pemerataan. Gagasan keadilan dan kesetaraan yang menjadi prinsip agar kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada beberapa individu saja. Harta bendaharus didistribusikan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kedua, hasil kekayaan yang bersumber dari pengelolaan penghasilan nasional harus disalurkan secara adil. Ketiga, Islam melarang penacarin uang yang melampaui batas wajar, apalagi jika uang dikumpulkan dengan cara yang salah.
- b. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Dalam Islam, pengertian persaudaraan (ukhuwah) digambarkan sebagai solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam, yang direpresentasikan dengan hubungan manusia. Islam menjunjung tinggi persaudaraan dan rasa kasih sayang dalam pendermaan harta benda sehingga umat Islam bisa makmur secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

⁷⁴Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, 1st ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).110.

⁷⁵Hertina, *Roblematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia* (Pekan Baru: Suska Press, 2013).11-12.

⁷⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga KeuangN Syariah Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2015).271.

- c. Prinsip solidaritas sosial. Islam memupuk solidaritas sosial, yang diwujudkan dan diaplikasikan dalam sistem seperti zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah merupakan bagian keuangan yang penting bagi umat Islam, dengan keduanya berperan penting dalam mendorong kesadaran sosial dan pemerataan ekonomi.⁷⁷

Suatu distribusi zakat memiliki tujuan tertentu, diantaranya adalah:

- a. Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh manusia.
- b. Mengurangi disparitas pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Untuk menyucikan harta benda dan jiwa.
- d. Menciptakan generasi yang unggul.
- e. Untuk menumbuhkan harta benda.⁷⁸

Penggunaan hasil pemungutan zakat bagi mustahik dilakukan pada prinsip-prinsip yang bergantung pada persyaratan

- a. Hasil pendataan dan penelitian terhadap kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Memprioritaskan golongan yang paling Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan sangat perlu uluran bantuan.
- c. Memprioritaskan mustahik yang dekat dengan daerah pemberi zakat.

Setelah poin-poin di atas terpenuhi, maka dilakukan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat untuk hal-hal produktif. Penggunaan zakat untuk kepentingan produktif memerlukan adanya bentuk usaha yang telah mendapat izin tertulis dari dewan penasihat dan memiliki potensi memberikan keuntungan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:

- a. Menjalankan studi kelayakan.
- b. Menentukan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan penyaluran dan bimbingan .
- d. Aktif memantau, mengendalikan, dan mengawasi.
- e. Secara rutin melakukan evaluasi.
- f. Membuat laporan.⁷⁹

⁷⁷Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2015).150.

⁷⁸Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, 1st ed. (Pekan Baru: Al-Mujtahadah Press, 2014).106.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja

Investasi sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang dari proses pembangunan dan perekonomian. Dengan investasi publik dan swasta, akan ada aktifitas produksi yang menyediakan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat.

Investasi, baik publik maupun swasta, krusial untuk pertumbuhan ekonomi karena tidak hanya menambah daya minat namun menambah pemasaran menggunakan pengaruhnya pada kapasitas produksi. Dengan peningkatan kapasitas produksi, maka produktivitasnya juga akan membaik sehingga akan menghasilkan peningkatan stok modal dari waktu ke waktu. Setiap penambahan modal stok mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menciptakan output sehingga berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kesempatan kerja.⁸⁰

Sejalan dari penelitian Sularsih,⁸¹ investasi memiliki dampak positif dan substansial pada peningkatan ekonomi dan ketersediaan peluang kerja.

2. Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja

Pengeluaran pemerintah yakni kebijakan yang digunakan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan warganya dan kemakmuran ekonomi negaranya. Pemerintah dapat mencapai tujuannya melalui pengeluaran dengan memastikan kelancaran fungsi pemerintah, operasional, pemeliharaan aset negara, kepatuhan terhadap tanggung jawab pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan orang miskin, dan stabilitas ekonomi.⁸² Pengeluaran pemerintah menjadi bagian dari anggaran untuk kesejahteraan warga negara dan kemakmuran ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Alkadri,⁸³

⁷⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 270.

⁸⁰Mintarti, "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja." (2017), 31-32.

⁸¹Sularsih, "Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Kaltim" (2010).

⁸²Djunasien dan Hidayat, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), 90.

⁸³Alkadri, "Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah" (2008).

tenaga kerja memiliki dampak positif dan substansial dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

3. Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan berbagai metrik. Zakat dapat dimasukkan dalam indikator pengukuran untuk memastikan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Melalui analisis dapat diketahui korelasi antara zakat dan pertumbuhan. Sehingga zakat merupakan salah satu sistem keuangan yang memiliki kontribusi pada aktifitas perekonomian karena mengarah pada kelanjutan pembangunan.

Zakat telah dipelajari secara ekstensif untuk jangka waktu yang lama. Al-Jarhi dan Zaim, sebagaimana dilansir Bakar dan Rahman, menunjukkan bahwa zakat juga memiliki *multiplier impact* bagi perekonomian. Menurut beberapa ekonom Muslim, zakat yang diinvestasikan sejalan dengan tujuan produksi secara keseluruhan bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu khususnya dan perekonomian pada umumnya melalui dampak pengganda pada lapangan kerja dan penghasilan. Zakat pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan dan mengurai kesulitan ekonomi. Standar kehidupan masyarakat akan meningkat pula seiring dengan peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan volume agregat zakat yang dikumpulkan akan memiliki efek positif pada laju peningkatan ekonomi dalam hal pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pengurangan tingkat inflasi.⁸⁴

Efek yang ditimbulkan zakat pada pembangunan ekonomi banyak dieksplorasi secara empiris. Analisis regresi panel Mohammed B. Yusoff periode 2006-2009 menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki pengaruh yang baik terhadap perkembangan ekonomi di Malaysia.⁸⁵ Zakat juga memiliki efek yang positif pada pertumbuhan ekonomi Pakistan. Lebih tepatnya, zakat sangat

⁸⁴Indonesia, *Seri Ekonomi Dan Keuangan (Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara)*, 45.

⁸⁵Mohammed B Yusof, "Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia," *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 (2011): No 6, 175-181.

meningkatkan kemakmuran masyarakatnya dan secara signifikan menambah pembangunan ekonomi Pakistan.⁸⁶

Bagian ini akan membahas pengaruh zakat terhadap pembangunan ekonomi secara konseptual dengan menggunakan metode tunggal. Menurut syariah, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, pelaksanaan zakat tidak akan mengakibatkan kontraksi ekonomi, melainkan akan menghasilkan pembangunan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'anat-Taubah (9) ayat 103, zakat, selain untuk tujuan pembersihan, juga menumbuhkan kekayaan. Demikian pula dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah yaitu: "Allah menerima zakat dengan tangan kanan-Nya dan kemudian menjadikannya harta itu tumbuh bagi setiap kamu, sebagaimana halnya kamu membesarkan anak kuda atau anak unta. Bagian-bagian harta itu kemudian menjadi sebesar Gunung Uhud" (Hadis Ahmad dan at-Tirmidzi).

Untuk mengilustrasikan konsep di atas dengan menggunakan ilmu ekonomi, pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan *multipliereffect* dari konsumsi, tabungan, investasi, dan kesempatan kerja. Misalnya, pengaruh zakat pada penawaran dan permintaan agregat,⁸⁷ pengaruh zakat pada keseimbangan umum, dan fungsi zakat dalam ekonomi makro semuanya dapat dievaluasi.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, zakat dapat meningkatkan atau mengurangi tingkat konsumsi berdasarkan jumlah keinginan pengeluaran di antara pemberi dan penerima, juga sebagian besar masyarakat yang mendapatkan zakat. Pengaruh zakat pada peningkatan ekonomi diukur dengan melihat *multiplier effect*-nya terhadap pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi dan investasi. Zakat mampu mendorong konsumsi apabila golongan mustahik mempunyai keinginan belanja yang lebih tinggi daripada kelompok muzaki. Apabila hal itu terjadi dalam jangka pendek, maka akan mendorong daya minat dan peningkatan ekonomi. Sementara itu, pengaruh zakat pada investasi bergantung pada produktivitas modal golongan muzaki daripada golongan mustahik sehingga mampu menambah peningkatan ekonomi dalam jangka panjang.

⁸⁶Nasir Iqbal dan Muhammad Tayyab Muhammad Azam, "Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan," *Bulletin of Business and Economics* 3 (2014), 85-95.

⁸⁷Muhammad Ibrahim Al-Suhaibani, "Effect of Zakat on Aggregate Demand, Dalam Monzer Kafh, *Economics of Zakat*" (1997).

Selain itu, zakat memiliki potensi untuk meningkatkan prospek pekerjaan baik dari sisi permintaan maupun penawaran dari pasar tenaga kerja. Zakat juga berpotensi untuk mendorong investasi. Penambahan tingkat investasi menyebabkan penambahan daya minat tenaga kerja. Selain itu, daya minat akan tenaga kerja ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah usaha kecil sebagai tanggapan atas peningkatan dana yang disediakan oleh dana zakat ini untuk karyawan dan pengusaha kecil. Tetapi, kenaikan investasi ini memiliki dampak pada pertumbuhan lapangan kerja tergantung pada fungsinya yaitu berupa modal atau padat karya. Jika padat karya yang diadopsi, terutama jika diaplikasikan pada golongan mustahik produktif, sehingga lebih banyak tenaga kerja banyak yang terserap. Di sisi lain, jika mengadopsi modal, penyerapan tenaga kerja akan kurang berperan.

Sementara itu, zakat dapat membantu orang miskin memperbaiki situasi fiskal, pengetahuan dan keterampilan, serta pendidikannya. Akibatnya, baik kualitas maupun kuantitas tenaga kerja yang tersedia akan tumbuh. Dalam kurun waktu yang sama, Islam mengizinkan pembentukan lembaga jaminan sosial dalam bentuk zakat, yang mendorong kualitas hidup minimal muzakki. Oleh sebab itu, keterlibatan lembaga tersebut mampu menstimulus sektor produktif lebih berkembang. Selain itu, Islam mempromosikan gagasan bagi hasil dalam perusahaan, yang dapat menghasilkan terciptanya peluang kerja. Proyeksikan zakat adalah meningkatkan tingkat pekerjaan, karena penerima zakat tidak diharuskan untuk membayar kembali dana tambahan.⁸⁸

⁸⁸Indonesia, *Seri Ekonomi Dan Keuangan (Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara)*, 50.

BAB III
PERTUMBUHAN
EKONOMI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

BAB III

PERTUMBUHAN EKONOMI

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Indonesia merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. pemerintah terus berupaya memaksimalkan potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang terlaksananya pembangunan di Indonesia.

Upaya tersebut terus menerus dilakukan agar perekonomian di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dalam beberapa indikator makro ekonomi Indonesia.

Secara umum kondisi ekonomi Indonesia dapat ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara.

Perkembangan kondisi makro ekonomi Indonesia selama periode 2001 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari perkembangan Pertumbuhan Ekonomi seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.1
*Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Tahun 2001 s.d. 2021*

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)
2001	3,6
2002	4,5
2003	4,8
2004	5,0
2005	5,7
2006	5,5
2007	6,3
2008	6,0

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)
2009	4,6
2010	6,2
2011	6,2
2012	6,0
2013	5,6
2014	5,0
2015	4,9
2016	5,0
2017	5,1
2018	5,2
2019	5,0
2020	-2,1
2021	3,7

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Angka Pertumbuhan Ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan peningkatan selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir (2001 s.d. 2021) dengan besaran masing – masing pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan sebesar 3,6%, pada tahun 2002 sebesar 4,5%, pada tahun 2003 sebesar 4,8%, pada tahun 2004 sebesar mengalami pertumbuhan sebesar 5,0%, pada tahun 2005 sebesar 5,7%, pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 5,5%, pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%, pada tahun 2008 sebesar 6,0%, pada tahun 2009 sebesar 4,6% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 6,2%. Perekonomian di Indonesia menurun pada tahun 2020, akibat terjadinya pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi minus dengan nilai -2,1% hal ini terjadi karena Indonesia dalam pandemi covid 19 yang menyebabkan kondisi perekonomian menurun.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi yang relatif tinggi adalah pada tahun 2010-2011 dengan laju pertumbuhan 6,2% dan yang relatif rendah adalah pada tahun 2020 yaitu -2,1%.

B. Kondisi Investasi Di Indonesia

Perkembangan investasi di Indonesia dari tahun 2001 sampai 2021 dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi bagi para pihak berkepentingan dan bahan guna memformulasikan kebijakan yang akan datang guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan target yang ditetapkan. Selain itu, gambaran investasi dapat pula dipandang untuk bahan

evaluasi dalam pelaksanaannya. Berikut data tentang realisasi investasi Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 pada tabel di bawah ini.

C. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Indonesia

Pengeluaran pemerintah merupakan hal penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan Nasional. Dalam mengeluarkan biaya atau anggaran ini dimaksudkan guna membiayai pembangunan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dalam hal ini merupakan biaya Kementerian /Lembaga yang mana biaya atau anggaran ini di peruntukkan sebagai biaya pembangunan. Berikut ini data mengenai realisasi pengeluaran pemerintah, yaitu :

TAHUN	PENGELUARAN PEMERINTAH
	(Miliar)
2001	315.756
2002	344.009
2003	370.155
2004	374.351
2005	397.769
2006	647.668
2007	763.571
2008	854.66
2009	1.037.067
2010	1.047.666
2011	1.229.558
2012	1.435.407
2013	1.683.011
2014	1.842.495
2015	2.039.483
2016	2.095.725
2017	2.080.451
2018	2.220.657
2019	2.461.112
2020	2.540.423
2021	2.750.028

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwasannya realisasi pengeluaran pemerintah di Indonesia yang terjadi pada tahun 2001 – 2021 mengalami peningkatan meskipun bersifat fluktuatif, pada tahun 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp 315.756 Miliar, pada tahun 2002 sebesar Rp 344.009 Miliar, pada tahun 2003 sebesar Rp 370.155 Miliar, pada tahun 2004 sebesar Rp 374.351 Miliar, pada tahun 2005 sebesar Rp 397.769 Miliar, pada tahun 2006 sebesar Rp 647.668 Miliar, pada tahun 2007 sebesar Rp 763.571 Miliar dan pada tahun 2008 Rp 854.66 Miliar, hingga pada tahun 2021 sebesar Rp 2.750.028 Miliar, pemerintah dalam hal ini cenderung menaikkan pengeluaran pemerintahnya untuk membangun ekonomi Indonesia agar dapat mensejahterakan rakyatnya lewat program-program pemerintah.

Dari data tabel VII, mengenai realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2001 s.d. 2021 dapat dilihat bahwasannya pengeluaran pemerintah yang paling besar terdapat pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp 2.750.028 Miliar dan yang paling sedikit pengeluaran pemerintahnya terdapat pada tahun 2001 dengan jumlah sebesar Rp 315.756 Miliar.

D. Kondisi Kesempatan Kerja Indonesia

Kesempatan kerja merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dengan demikian, salah satu tujuan pembangunan adalah untuk memperluas lapangan kerja yang ada dan menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk menyerap tambahan tenaga kerja yang masuk ke pasar setiap tahunnya.

Komponen ekonomi menjelaskan bahwa manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan kapasitas manusia.

Program pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan pengangguran adalah dengan cara perluasan peluang kerja atau lowongan kerja di berbagai bidang melalui pembangunan sesuai dengan potensi, geografis, dan karakteristik wilayah.

Pada umumnya hampir semua sektor mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja meskipun selalu berfluktuasi.

Pertumbuhan perekonomian dicerminkan pada sektor – sektor usaha yang digambarkan pada produk domestik regional brutonya serta memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan kesempatan

kerja di Indonesia. Berikut data mengenai realisasi kesempatan kerja di Indonesia.

TABEL 3.3
Realisasi Kesempatan Kerja Di Indonesia
Pada Tahun 2001 s.d. 2021

TAHUN	KESEMPATAN KERJA
	(ORANG)
2001	90.807.417
2002	91.647.166
2003	90.784.917
2004	93.722.036
2005	94.948.118
2006	95.456.935
2007	99.930.217
2008	102.552.750
2009	104.870.663
2010	108.207.767
2011	109.670.399
2012	110.808.154
2013	110.804.041
2014	114.628.026
2015	114.819.199
2016	118.411.973
2017	121.022.423
2018	124.004.950
2019	126.515.119
2020	128.454.184
2021	131.050.523

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 3.3 dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2001 yang mana jumlah kesempatan kerja sebanyak 90.807.417 orang, pada tahun 2002 sebanyak 91.647.166 orang, pada tahun 2003 mengalami sedikit penurunan sebanyak 90.784.917 orang, pada tahun 2004 sebanyak 93.722.036 orang, dan terus meningkat sampai pada tahun 2021 sebanyak 131.050.523 orang.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kesempatan kerja di Indonesia pada tahun 2001 sampai tahun 2021 yang relatif tinggi

terjadi pada tahun 2021 sebanyak 131.050.523 orang sedangkan yang paling sedikit kesempatan kerjanya terjadi pada tahun 2003 yaitu 90.784.917 orang.

E. Kondisi Zakat di Indonesia

Zakat didefinisikan oleh para pemikir ekonomi Islam kontemporer sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk diberikan kepada masyarakat umum atau perorangan yang bersifat mengikat dan final, tanpa pemilik harta menerima imbalan tertentu berdasarkan kemampuannya. Besaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan kelompok berbeda (asnaf) seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yakni fakir, amil, miskin, riqab, mu'alaf, fisabilillah, gharimin, dan Ibnu Sabil.

Zakat berasal dari bahasa Arab “zaka” yang artinya suci, bermanfaat, berkah, bertambah, dan berkembang. Zakat dinamakan demikian karena membawa kebaikan yang bermanfaat, membersihkan jiwa, dan memeliharanya dengan berbagai bentuk kebaikan.

Makna tumbuh dalam konteks zakat menunjukkan bahwa meskipun zakat merupakan kewajiban untuk membersihkan harta, namun dalam penerapannya banyak menghasilkan manfaat. Sedangkan makna ketuhanan menunjukkan bahwa zakat dimaksudkan untuk membersihkan jiwa, keburukan, dan dosa. Berikut data mengenai realisasi penerimaan zakat di Indonesia.

Tabel 3.4
Realisasi Penerimaan Zakat Di Indonesia
Pada Tahun 2001 s.d. 2021

TAHUN	ZAKAT
2001	120.694.549.04
2002	288.643.666.13
2003	1.307.300.388.00
2004	2.224.208.946.64
2005	2.540.588.847
2006	4.825.501.587
2007	8.307.940.585

TAHUN	ZAKAT
2008	15.355.092.415
2009	19.371.179.661
2010	12.769.270.318
2011	11.365.267.381
2012	4.368.892.219
2013	50.741.735.215
2014	3.826.832.451.83
2015	66.766.033.369
2016	97.637.657.910
2017	138.096.290.551
2018	153.153.229.174
2019	248.342.677.327
2020	305.347.256.942
2021	24.771.249.047,37

Sumber : BAZNAS RI

Tabel 3.4 tentang realisasi penerimaan zakat di Indonesia setiap tahunnya selalu berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2001 nilainya sejumlah Rp120.694.549.04, pada tahun 2002 sebanyak Rp288.643.666.13, sampai pada tahun 2021 sebanyak Rp248.342.677.327. nilai penerimaan zakat yang tertinggi pada tahun 2021 dan kemudian yang terendah pada tahun 2001.

F. Rekapitulasi Data Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian dan gambaran umum mengenai kondisi investasi, pengeluaran pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, serta kesempatan kerja di Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 maka dapat dilihat pada tabel 4.1.

BAB IV
ANALISIS DAN
PEMBAHASAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERTUMBUHAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Analisis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengujipengaruh Investasi, jumlah pengeluaran pemerintah dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada kesempatan kerja. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa hasil analisis deskriptif terkait nilai investasi, pengeluaran pemerintah dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kesempatan kerja dan hasil analisis jalur yang akan menguji pengaruh antar variabel tersebut.

1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk melihat gambaran nilai Investasi, Pengeluaran pemerintah, Zakat, Pertumbuhan ekonomi dan Kesempatan kerja berdasarkan nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi. Berdasarkan data yang terkumpul selama dilakukan penelitian, hasil analisis deskriptif ditampilkan tabel berikut ini dengan kelima variabel yang digunakan adalah :

TABEL 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min	Max	Standard Deviation
Investasi	174366.252	35096.7	478156.6	141070.429
Pengeluaran	1321991.810	85466.0	2750028.0	840056.196
Zakat	92406088700.590	2540588847.0	382683245183.0	109176108290.496
Kesempatan_Kerja	108719856.048	90784917.0	131050523.0	12762070.170
Pertumbuhan_Ekonomi	4.848	-2.1	6.3	1.715

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 yang dianalisis secara deskriptif, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan pendapatan nasional riil pada tahun tertentu sebagai proporsi dari PDB di Indonesia, yang dinyatakan dalam persen. Nilai pertumbuhan ekonomi perusahaan sampel yang dianalisis dari tabel diatas menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi selama periode pengamatan memiliki nilai terendah -2,1 dan nilai terbesar 6,3 dengan standar deviasi 1,715. Standar deviasi dari analisis tidak melebihi nilai mean, hal ini menunjukkan bahwa data kesempatan kerja tidak mengandung banyak fluktuasi dan dapat memiliki distribusi normal. Grafik berikut menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2001 dan 2021. :



GAMBAR 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2001 – 2021

Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2001 – 2021 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu tersebut. Namun demikian, hal yang paling terlihat dalam grafik tersebut adalah adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis sehingga nilai pertumbuhan ekonimi minus, yaitu sebesar -2,1% di tahun 2020, hal ini dimungkinkan karena di tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi hampir seluruh negara di dunia.

a. Kesempatan Kerja

Total lowongan pekerjaan yang tersedia di dunia kerja, atau jumlah kemungkinan pekerjaan yang dapat diakses oleh angkatan kerja, dengan dinyatakan dalam individu, dikenal sebagai kesempatan kerja. Merujuk pada hasil analisis deskriptif di Tabel 5.1, diperoleh gambaran bahwa nilai Kesempatan Kerja pada sampel perusahaan dengan kurun waktu yang ditentukan pada pengamatan memiliki nilai paling rendah 90784917 dan paling tinggi sebesar 131050523 dan memiliki standar deviasi sebesar 12762070,170. Berdasarkan standar deviasi dan mean yang dianalisa, nilai standar deviasi **tidak melebihi** nilai mean yang menunjukkan bahwa data kesempatan kerja tidak mengalami fluktuasi terlalu besar sehingga terdistribusi normal. Grafik kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2001 – 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



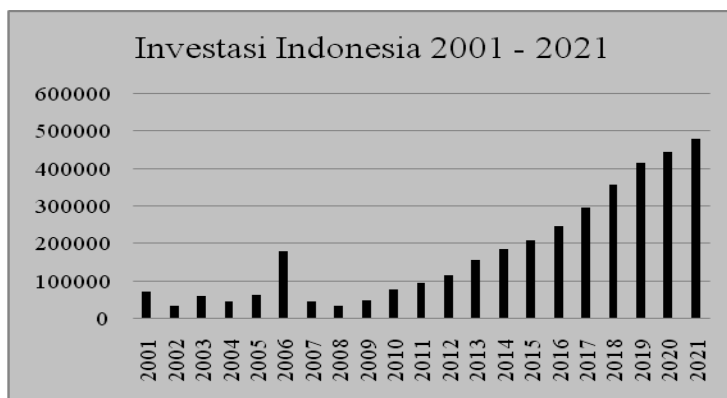
GAMBAR 4.2
Kesempatan Kerja 2001-2021

Kesempatan kerja di Indonesia selama periode 2001 – 2021 dapat dikatakan cukup stabil, tidak ada fluktuasi dalam grafik meski terjadi krisis ekonomi di tahun 2008.

b. Investasi

Investasi adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang direalisasikan di Indonesia, yang dinyatakan dalam rupiah. Merujuk pada

hasil analisis deskriptif pada Tabel 5.1, diperoleh gambaran bahwa nilai Investasi perusahaan sampel selama periode pengamatan memiliki nilai terendah 35096,7 dan tertinggi sebesar 478156,6 dengan standar deviasi sebesar 141070,429. Berdasarkan pada nilai mean dan standar deviasi, nilai standar deviasi tidak melebihi nilai mean, yang menunjukkan bahwa data investasi tidak banyak mengandung fluktuasi sehingga dapat terdistribusi secara normal.



GAMBAR 4.3
Investasi Indonesia 2001– 2021

Grafik pada Gambar 5.3 di atas menunjukkan adanya peningkatan investasi pemerintah dari tahun ke tahun, fluktuasi tinggi terjadi di Tahun 2006, hal ini karena di tahun tersebut kemungkinan Indonesia sedang berupaya mengembangkan investasinya namun di Tahun 2008 terjadi krisis global yang selanjutnya menyebabkan penurunan di berbagai aspek ekonomi termasuk penurunan investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Krisis global saat itu memang menjadi penyebab penurunan seluruh sektor ekonomi di pasar dunia, hampir seluruh negara mengalami keruntuhan ekonomi (keadaan gawat) dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia.

- c. **Pengeluaran Pemerintah**
Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai peningkatan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, khususnya belanja untuk K/L, yang dinyatakan

dalam rupiah. Menurut hasil analisis deskriptif di Tabel 5.1, diperoleh gambaran bahwa nilai Pengeluaran perusahaan pada periode pengamatan memiliki nilai terendah 85466 dan tertinggi sebesar 2750028 dengan standar deviasi sebesar 840056,196. Berdasarkan mean dan standar deviasi, nilai standar deviasi tidak melebihi nilai mean, menunjukkan bahwa data pengeluaran pemerintah terdistribusi secara normal dan mengandung sedikit fluktuasi.



GAMBAR 4.4

Pengeluaran pemerintah Indonesia Tahun 2001 – 2021

Hasil analisis pada Gambar 5.4 menunjukkan adanya penurunan sangat drastis pengeluaran pemerintah Indonesia di tahun 2008, padahal di tahun – tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah selalu meningkat, dimana salah satu ciri negara berkembang adalah pengeluaran strategis yang terus meningkat di setiap tahunnya. Fluktuasi penurunan pengeluaran pemerintah di Tahun 2008, kemungkinan disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh bangsa di dunia, kegawat daruratan perekonomian menyebabkan negara- negara termasuk Indonesia mengurangi pengeluarannya untuk tetap dapat bertahan di tengah krisis.

d. Zakat

Zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jumlah nilai Zakat Negara Indonesia dan dinyatakan dalam Rupiah. Menurut hasil analisis deskriptif pada Tabel 5.1,

diperoleh gambaran bahwa nilai Zakat perusahaan sampel selama kurun waktu pengamatan memiliki nilai terendah 2540588847 dan tertinggi sebesar 382683245183 dengan standar deviasi sebesar 109176108290,496. Berdasarkan mean dan standar deviasi, nilai standar deviasi **melebihi** nilai mean, menunjukkan bahwa data zakat tidak terdistribusi secara teratur dan mengalami fluktuasi yang signifikan.



GAMBAR 4.5
Zakat Negara Indonesia 2001 – 2021

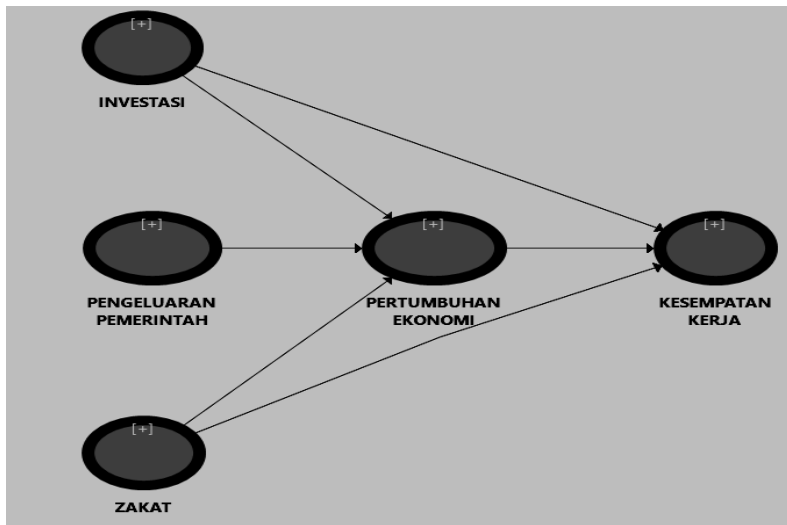
Zakat yang dikeluarkan negara Indonesia tidak memiliki pola yang konsisten. Grafik 5.5 tidak menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan jumlah zakat setiap tahunnya, namun hal yang dapat dilihat pada grafik tersebut adalah, di tahun 2004, 2014 dan 2020 zakat yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan zakat di tahun – tahun lainnya selama kurun waktu 2001 – 2021.

2. Analisis Jalur

Dalam penelitian ini, pengaruh investasi, zakat dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta dampaknya terhadap kesempatan kerja di Indonesia tahun 2001-2020 akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis jalur. Pemilihan teknik analisis jalur ini dikarenakan model penelitian ini memuat

variabel intervening, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi. Ghozali⁸⁹ menjelaskan bahwa pada model penelitian yang memuat variabel intervening atau variabel pemoderasi, teknik analisis jalur lebih tepat dibandingkan analisis regresi linear berganda, dengan menggunakan teknik analisis jalur, hubungan langsung dan tidak langsung dapat diuji.

Analisis jalur dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS. Hair⁹⁰ menyatakan bahwa penggunaan sangat efektif pada saat data yang dianalisis merupakan data sekunder dengan jumlah observasi kecil (<100) sehingga dimungkinkan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan kerangka model dan hipotesis yang diberikan dalam penelitian ini, maka program SmartPLS akan digunakan mengestimasi model diagram jalur sebagai berikut :



GAMBAR 4.6
Model Diagram Jalur dalam Software PLS

Tahap – tahap dalam analisis jalur tidak seperti pada tahap analisis SEM PLS. Tahap pada analisis SEM PLS terdiri dari tahap

⁸⁹Imam Ghozali, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*, Edisi 6. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

⁹⁰C.M. Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M. and Ringle, “When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM,” *European Business Review* Vol. 31 No (2019), 5.

pengujian outer model dan uji inner model, sementara pada analisis jalur uji outer model tidak perlu dilakukan karena model analisis jalur tidak memuat variabel latent. Seluruh variabel merupakan variabel manifest sehingga tidak memerlukan pengujian validitas dan reliabilitas sebagaimana dalam analisis SEM PLS.⁹¹

a. Pengujian Goodness Of Fit Model

Dalam analisis jalur yang diselesaikan dengan program SmartPLS, sebelum pengujian pengaruh antar variabel dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian goodness of fit model PLS, pengujian ini bertujuan untuk menilai kelayakan model dalam memprediksi pengaruh antar variabel dalam model. Pengujian goodness of fit model ini dapat dilakukan dengan melihat nilai R Square, nilai Q Square dan nilai SRMR model.

1) R Square

Pada analisis jalur, nilai *R square* variabel endogen menunjukkan kekuatan model dalam memprediksi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Semakin besar pengaruh variabel – variabel eksogen terhadap endogen, maka semakin besar nilai R Square, sebaliknya, semakin rendah pengaruh variabel eksogen terhadap endogen maka semakin kecil nilai R square karena masih ada banyak faktor di luar eksogen dalam model diagram jalur yang mempengaruhi variabel endogen.

Menurut Chin,⁹² mengkategorikan nilai R² menjadi 3 yakni apabila nilai R² sebesar 0.67, maka model PLSnya berkategori kuat; apabila nilainya 0.33, maka model PLSnya berkategori moderat; dan apabila nilainya 0.19, maka model PLSnya berkategori lemah.

TABEL 4.2
Nilai R Square Model

	R Square	R Square Adjusted
KK	0,804	0,769
PE	0,393	0,286

Sumber : data diolah (2022)

⁹¹Ghozali, Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS).243.

⁹²W. W. Chin, “The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling, Modern Methods for Business Research” (1998): 295, 336.

Hasil analisis pada tabel XII tersebut menunjukkan bahwa nilai R square variabel pertumbuhan ekonomi (PE) adalah sebesar 0,393 dan R square variabel Kesempatan Kerja sebesar 0,804. Hal ini berarti bahwa model memiliki kekuatan pada kategori moderate saat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi dari faktor pengeluaran pemerintah, investasi dan zakat, sementara model sangat kuat pada saat digunakan untuk memprediksi kesempatan kerja. 39,3% variansi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh nilai investasi, pengeluaran pemerintah dan zakat, sementara sisanya sebesar 69,7% variansi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor lain di luar nilai investasi, pengeluaran pemerintah dan zakat. Selanjutnya pada variabel kesempatan kerja, 80,4% variansi kesempatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, pengeluaran pemerintah dan zakat, sementara sisanya sebanyak 19,6% variansi kesempatan kerja dipengaruhi faktor lain di luar pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, pengeluaran pemerintah dan zakat.

2) Q Square

Selain dari nilai R², kriteria kualitas model PLS dapat dilihat dari nilai Q Square (Q²). Terdapat 3 kategori dari nilai Q² yakni: apabila nilainya 0,02, maka berkategori kecil; apabila nilainya 0,15, maka berkategori sedang; dan apabila nilainya 0,35, maka berkategori besar.

TABEL 4.3
Q Square

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
INV	21,000	21,000	
KK	21,000	7,611	0,638
PE	21,000	17,750	0,155
PP	21,000	21,000	
ZAKAT	21,000	21,000	

Sumber : data diolah (2022)

Hasil analisis pada tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa nilai Q square variabel pertumbuhan ekonomi (PE) yaitu sebesar 0,155 dan Q square variabel kesempatan kerja (KK) sebesar 0,638, oleh karena nilai Q Square

pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 0,02 – 0,15 maka dinyatakan bawa model PLS ini memiliki *predictive relevance* pada kategori sedang, sedangkan pada variabel kesempatan kerja, Q Square yang diperoleh sebesar 0,638 jauh melebihi 0,35 yang berarti bahwa model memiliki *predictive relevance* yang besar saat digunakan untuk memprediksi kesempatan kerja berdasarkan variabel yang eksogennya.

3) SRMR

SRMR dapat memberikan informasi guna mengetahui perbedaan dari data yang diuji dan model yang diestimasi. Dalam pengujian *goodness of fit* dari model berdasarkan nilai SRMR ini yakni: apabila nilai SRMR-nya lebih rendah dari 0,08, maka model model dinyatakan *perfect fit*; dan apabila nilai SRMR-nya lebih rendah dari 0,10, maka model dinyatakan *fit*.

TABEL 4.4
SRMR Model

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,000	0,038

Sumber : data diolah (2021)

Tabel 4.5 menampilkan hasil pengujian diperoleh nilai SRMR model yakni 0,038. Karena nilai SRMR lebih rendah dari 0,08, maka model tersebut sangat cocok untuk memproyeksikan korelasi variabel.

Berdasarkan nilai R^2 , Q^2 , dan SRMR, maka dapat dikonklusikan bahwa model PLS layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

b. Pengujian Pengaruh Langsung

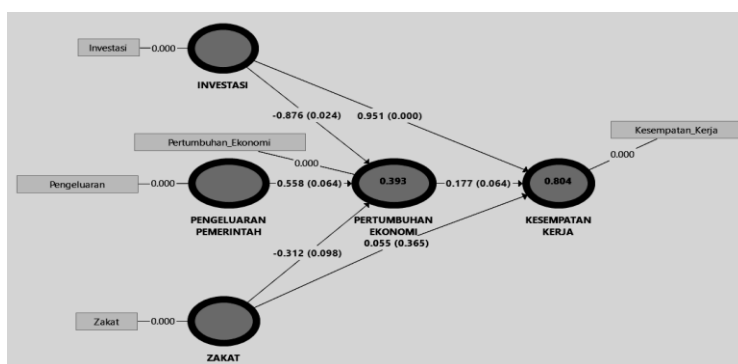
Pengujian pengaruh langsung dalam analisis jalur dengan program SmartPLS dilakukan dengan melihat nilai *p-value* dan T Statistics. Pengujian pengaruh antar variabel ini menggunakan uji hipotesis 1 arah (one tail) dengan taraf signfiikansi 10% atau dengan kata lain, hasil pengujian ini dapat dipercaya pada tingkat kepercayaan 90%. Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

Ho : Variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel endogen

Ha : Variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen

Dengan tingkat keyakinan 90% maka Ho ditolak apabila $p\text{-value} < 0,1$ atau T Statistik $> 1,28$ dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel eksogen terhadap endogen, sementara jika $p\text{-value} > 0,1$ dan T Statistik $< 1,28$ maka Ho tidak ditolak dan dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap endogen.

Berikut adalah tabel hasil uji pengaruh antar variabel :



GAMBAR 4.7

Hasil Estimasi Model Analisis Jalur – bootstrapping 500

Dapat dilihat dari hasil estimasi model analisis jalur pada gambar di atas bahwa dengan melakukan *bootstrapping* sebanyak 500 data, 1 jalur terbukti tidak signifikan pada level 10%, sementara jalur lainnya signifikan. Tabel berikutnya memberikan informasi lebih lanjut mengenai hasil pengujian pengaruh antar variabel :

TABEL 4.5
Hasil Uji Pengaruh Langsung

Path	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P-values
INV -> KK	0,951	0,953	0,136	6,989	0,000
INV -> PE	-0,876	-0,834	0,441	1,985	0,024
PE -> KK	0,177	0,212	0,116	1,519	0,064
PP -> PE	0,558	0,577	0,366	1,525	0,064

ZAKAT ->KK	0,055	0,048	0,159	0,344	0,365
ZAKAT -> PE	-0,312	-0,314	0,241	1,294	0,098

Sumber : data diolah (2022)

Berikut adalah hasil analisis berdasarkan informasi pada tabel di atas :

1) Jalur INV \rightarrow KK

Pada jalur yang menunjukkan pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,000 dengan T statistik 6,989 dengan koefisien jalur positif sebesar 0,951. Karena nilai *p-value* < 0,10 dan T statistik > 1,28 maka dapat dinyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Investasi maka semakin tinggi Kesempatan Kerja. Peningkatan Investasi secara signifikan dapat meningkatkan Kesempatan Kerja, sementara penurunan Investasi akan berimbas pada penurunan Kesempatan Kerja.

2) Jalur INV \rightarrow PE

Pada jalur yang menunjukkan pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,024 dengan T statistik 1,985 dengan koefisien jalur negatif sebesar -0,876. Karena nilai *p-value* < 0,10 dan T statistik > 1,28 maka dapat dinyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Investasi maka semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan Investasi secara signifikan dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, sementara penurunan Investasi akan berimbas pada penurunan Pertumbuhan Ekonomi.

3) Jalur PP \rightarrow PE

Pada jalur yang menunjukkan pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,064 dengan T statistik 1,525 dengan koefisien jalur positif sebesar 0,558. Karena nilai *p-value* < 0,10 dan T statistik > 1,28 maka dapat dinyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Pengeluaran Pemerintah maka semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan Pengeluaran Pemerintah secara signifikan dapat meningkatkan Pertum-

buhan Ekonomi, sementara penurunan Investasi akan berimbas pada penurunan Pertumbuhan Ekonomi.

4) Jalur PE → KK

Pada jalur yang menunjukkan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,064 dengan T statistik 1,519 dengan koefisien jalur positif sebesar 0,177. Karena nilai *p-value* < 0,10 dan T statistik > 1,28 maka dapat dinyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka semakin tinggi Kesempatan Kerja. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan dapat meningkatkan kesempatan kerja, sementara penurunan pertumbuhan ekonomi akan berimbas pada penurunan kesempatan kerja di Indonesia.

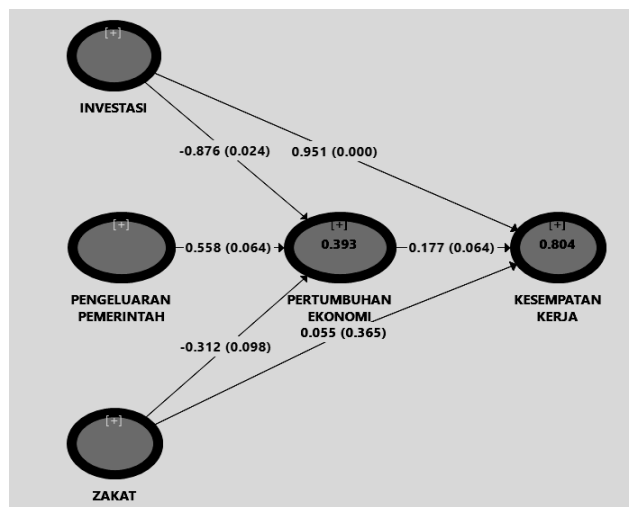
5) Jalur ZAKAT → KK

Pada jalur yang menunjukkan pengaruh Zakat terhadap Kesempatan Kerja, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,398 dengan T statistik 0,365 dengan koefisien jalur positif sebesar 0,055. Karena nilai *p-value* > 0,10 dan T statistik < 1,28 maka dapat dinyatakan bahwa Zakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Hal ini berarti bahwa jumlah zakat negara Indonesia tidak dapat berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Indonesia, peningkatan jumlah zakat negara Indonesia tidak selalu dapat meningkatkan Kesempatan Kerja.

6) Jalur ZAKAT → PE

Pada jalur yang menunjukkan pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,093 dengan t statistik 1,322 dengan koefisien jalur negatif sebesar -0,312. Karena nilai *p-value* < 0,10 dan t statistik > 1,65 maka dapat dinyatakan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah zakat negara Indonesia maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan jumlah zakat negara Indonesia secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara penurunan jumlah zakat

negara Indonesia dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



GAMBAR 4.8
Path Model

Berdasarkan gambar hasil estimasi model analisis jalur (terlihat lebih sederhana dengan indikator tidak diperlihatkan) diperoleh hasil :

- 1) Koefisien jalur Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah -0,876; koefisien jalur pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 0,558 dan koefisien jalur zakat sebesar -0,312. Hal ini berarti bahwa di antara investasi, pengeluaran pemerintah dan zakat, investasi yang merupakan jumlahan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang direalisasikan di Indonesia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara jumlah zakat negara Indonesia merupakan faktor yang paling lemah pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah perlu mengutamakan kemajuan di sektor investasi yang berupa PMDN dan PMA yang direalisasikan di Indonesia.
- 2) Nilai R Square pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,393, dengan nilai tersebut maka diperoleh nilai error persamaan jalur sebesar $e = \sqrt{1 - R^2} = 0,779$.

Berdasarkan nilai error persamaan tersebut, diperoleh persamaan jalur pada model sub struktural I sebagai berikut:

$$Y = -0,876 X_1 + 0,558 X_2 - 0,312 X_3 + 0,779$$

Dengan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

X₁ = Investasi

X₂ = Pengeluaran Pemerintah

X₃ = Zakat

- 3) Koefisien jalur Investasi terhadap kesempatan kerja adalah 0,951; koefisien jalur pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja adalah 0,177 dan koefisien jalur zakat terhadap kesempatan kerja sebesar 0,055. Hal ini berarti bahwa di antara investasi, pertumbuhan ekonomi dan zakat, investasi yang merupakan jumlahan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang direalisasikan di Indonesia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesempatan kerja di Indonesia, sementara jumlah zakat negara Indonesia merupakan faktor yang paling lemah pengaruhnya terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa dalam upaya peningkatan kesempatan kerja di Indonesia, pemerintah perlu mengutamakan kemajuan di sektor investasi yang berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang direalisasikan di Indonesia. Dengan adanya investasi dan kerja sama dengan negara lain, kesempatan kerja di Indonesia semakin meningkat.

- 4) Nilai R Square pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,804, dengan nilai tersebut maka diperoleh nilai error persamaan jalur sebesar $e = \sqrt{1 - R^2} = 0,443$. Berdasarkan nilai error persamaan tersebut, diperoleh persamaan jalur pada model sub struktural II sebagai berikut :

$$Y = 0,951 X_1 + 0,177 X_2 + 0,055 X_3 + 0,443$$

Dengan :

Y = Kesempatan Kerja di Indonesia

X₁ = Investasi

X₂ = Pengeluaran Pemerintah

X₃ = Zakat

c) Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Model penelitian ini menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pada pengaruh investasi dan zakat terhadap kesempatan kerja, sehingga memungkinkan adanya hubungan langsung variabel investasi dan zakat melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji signifikansi hubungan tidak langsung tersebut maka dilakukan pengujian dengan hipotesis pengujian sebagai berikut :

Ho : Investasi/zakat tidak dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi

Ha : Investasi/zakat dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi

Dengan taraf signifikansi 10% maka Ho ditolak jika $p\text{-value} < 0,10$ dan dinyatakan bahwa investasi/zakat dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi, sementara apabila $p\text{-value} > 0,10$ maka dapat dinyatakan bahwa investasi/zakat tidak dapat mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

TABEL 4.6
Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Indirect Effect	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P-values
INV -> PE -> KK	-0,195	0,165	0,939	0,174
PP -> PE -> KK	0,147	0,134	0,736	0,231
ZAKAT -> PE -> KK	-0,063	0,085	0,650	0,258

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tidak langsung pada tabel di atas, diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

- a) Investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak selalu dapat meningkatkan/menurunkan pertumbuhan ekonomi perusahaan yang selanjutnya akan berimbas pada peningkatan/penurunan kesempatan kerja, hal ini ditunjukkan dengan $p\text{-value}$ jalur tidak langsung yang tidak signifikan yaitu sebesar $0,174 > 0,10$ dan T statistik sebesar $0,939 < 1,28$.

- b) Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingginya pengeluaran pemerintah Indonesia tidak kemudian dapat meningkatkan/menurunkan pertumbuhan ekonomi perusahaan yang selanjutnya akan berimbas pada peningkatan/penurunan kesempatan kerja, hal ini ditunjukkan dengan *p-value* jalur tidak langsung yang tidak signifikan yaitu sebesar $0,231 > 0,10$ dan T statistik sebesar $0,736 < 1,28$.
- c) Zakat negara Indonesia memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyaknya zakat yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak selalu dapat meningkatkan/menurunkan pertumbuhan ekonomi perusahaan yang selanjutnya akan berimbas pada peningkatan/penurunan kesempatan kerja, ditunjukkan dengan *p-value* jalur tidak langsung yang tidak signifikan yaitu sebesar $0,258 > 0,10$ dan T statistik sebesar $0,650 < 1,28$.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis berdasarkan hasil analisis jalur yang dilakukan dalam studi ini :

TABEL I
Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia	Koef Jalur = -0,876; T Statistik = 1,985; p value = 0,024	Diterima
2	Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia	Koef Jalur = 0,558; T Statistik = 1,525; p value = 0,064	Diterima
3	Zakat berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia.	Koef Jalur = -0,312; T Statistik = 1,294; p value = 0,098	Diterima
4	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia.	Koef Jalur = 0,177; T Statistik = 1,519; p value = 0,064	Diterima
5	Investasi melalui Pertumbuhan	Koef Jalur = -0,195; T	Tidak diterima

No	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
	Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia	Statistik = 0,939; p value = 0,174	
6	Pengeluaran Pemerintah melalui Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia	Koef Jalur = 0,147; T Statistik = 0,736; p value = 0,231	Tidak diterima
7	Zakat melalui Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia	Koef Jalur = -0,063; T Statistik = 0,650; p value = 0,258	Tidak diterima

Sumber : data diolah (2022)

Berikut penjelasan ringkasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya:

a. Hipotesis 1

Hipotesis 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia. Hasil analisis studi ini mengungkapkan bahwa pada jalur yang menunjukkan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai p value sebesar 0,024 dengan T statistik 1,985 dengan koefisien jalur negatif sebesar -0,876, Karena nilai p value < 0,10 dan T statistik > 1,65 maka dapat dinyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini berarti bahwa semakin tinggi investasi maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan investasi akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendukung bukti untuk hipotesis 1 sehingga **hipotesis 1 diterima**.

Menurut Keynes dkk, laju pertumbuhan ekonomi ber-hubungan positif dengan investasi.⁹³ Keynes percaya bahwa pemerintah adalah organisasi otonom yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas publik. Oleh karena itu, Keynes mengusulkan bahwa, selama resesi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pemerintah (G), yang mendorong

⁹³M. L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).133-134.

konsumsi (C) dan investasi (I), yang menghasilkan peningkatan pendapatan nasional (Y). Hal ini sesuai dengan penelitian Irwan Pirda Atmi Danisa⁹⁴ yang menyatakan keberadaan PMDN dan PMA akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Hipotesis 2

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pada jalur yang menunjukkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai p value sebesar 0,064 dengan T statistik 1,525 dengan koefisien jalur positif sebesar 0,558. Karena nilai p value < 0,10 dan T statistik > 1,65 maka dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan pengeluaran pemerintah akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan validitas hipotesis 2 dalam penelitian ini, sehingga **hipotesis 2 diterima**.

Menurut Nanga⁹⁵ Pengeluaran pemerintah memiliki efek langsung pada permintaan kumpulan untuk barang dan jasa, mempengaruhi pendapatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar pengeluaran pemerintah, semakin berkembang ekonominya akan menyebabkan semakin besar ukuran pemerintah; di mana ukuran pemerintah diukur dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Hukum Wagner adalah nama yang diberikan untuk pemikiran ini, yang pertama kali diusulkan pada abad ke-19 oleh ekonom Jerman Adolf Wagner. STerdapat pemikiran lain yg berbeda dan menganggap bahwa pengeluaran pemerintah berdampak pada perkembangan ekonomi. Teori Keynes dinamai menurut pendapatnya, yang

⁹⁴Pirda and Danisa, "Penanaman Modal Asing Serta Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disusun Oleh.

⁹⁵Muara Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah Dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

diungkapkannya sekitar awal abad kedua puluh. Wagner menganggap pengeluaran pemerintah sebagai variabel endogen dalam perkembangan ekonomi, sedangkan Keynes melihatnya sebagai variabel eksogen. Akibatnya, menurut Keynes, pengeluaran pemerintah menjadi penyebab pembangunan ekonomi.⁹⁶ Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Danawati⁹⁷ mengenai dampak positif dari kesempatan kerja yang didorong oleh pengeluaran pemerintah dan investasi.

c. Hipotesis 3

Hipotesis 3 dalam studi ini mengusulkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia. Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa pada jalur yang menunjukkan pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai p value sebesar 0,098 dengan T statistik 1,294 dengan koefisien jalur negatif sebesar -0,312. Karena nilai p value < 0,10 dan T statistik > 1,65 maka dapat dinyatakan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini berarti bahwa semakin tinggi zakat maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan zakat secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan zakat akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menguatkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, sehingga **hipotesis 3 diterima**.

Menurut Ibnu Taimiyah sumber penerimaan negara meliputi tiga hal yaitu, ghanimah, sedekah (zakat) dan fa'i.⁹⁸ Demi merealisasikan tujuan yang akan dituju dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan dibentuknya institusi yang gunanya mengawasi lajunya pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan Institusi Hisbah.⁹⁹ Ibnu

⁹⁶Akhmad Solikin, "Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis," *Info Artha* 2, no. 1 (2018), 65–89.

⁹⁷Bendesa, "Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.

⁹⁸Taimiyah Ibnu, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar alKitab al 'Arabi, 1969).57.

⁹⁹Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).221-222.

Taimiyah mendefinisikan sebagai Lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad Syubaili Bin Mohamed¹⁰⁰ bahwa hubungan yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan ekonomi dan zakat berhubungan positif.

d. Hipotesis 4

Hipotesis 4 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia. Hasil analisis studi ini mengungkapkan bahwa pada jalur yang menunjukkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja, diperoleh nilai p value sebesar 0,064 dengan T statistik 1,519 dengan koefisien jalur positif sebesar 0,177. Karena nilai p value < 0,10 dan T statistik > 1,65 maka dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi zakat maka semakin tinggi kesempatan kerja. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat meningkatkan kesempatan kerja, sementara penurunan pertumbuhan ekonomi akan berimbas pada penurunan kesempatan kerja. Hal ini mendukung hipotesis 4 dalam penelitian ini sehingga **hipotesis 4 diterima**.

Hasil jangka panjang model Solow Swan¹⁰¹ menunjukkan bahwa investasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pengaruh positif. Investasi memiliki dua tujuan: yaitu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Investasi berfungsi sebagai modal dalam kegiatan produksi guna meningkatkan jumlah barang hasil produksi. Peningkatan investasi tentunya juga berdampak pada perekonomian karena dapat digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, teknologi, bahkan membayar upah tenaga kerja. Peningkatan kapasitas manufaktur akan meningkatkan pendapatan dan PDB negara secara jangka panjang.

¹⁰⁰Syubaili et al., "Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia.

¹⁰¹Inma Fatmawati, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Model Solow Dan Model Schumpeter," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2015), 1–12.

Prediksi pertumbuhan ekonomi untuk suatu dapat diperkirakan dengan konsep elastisitas. Konsep ini dapat digunakan untuk membangun simulasi kebijakan pembangunan untuk lapangan kerja, baik untuk masing-masing sektor maupun untuk keseluruhan sektor. Penyusunan kebijakandapat dilakukan dengan memilih beberapa alternatif laju pertumbuhan untuk setiap sektor, sehingga kebijakan yang dipilih dapat memungkinkan sesuai dengan situasi ekonomi. Elastisitas kesempatan kerja dapat direpresentasikan untuk keseluruhan sekotr perekonomian atau untuk sebagian sektor dan subsektor. Konsep elastisitas digunakan untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja. Konsep elastisitas didefinisikan sebagai perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh perubahan harga.¹⁰² Hal ini sejalan dengan penelitian Made Suyana Utama¹⁰³ yang menjelaskan dampak positif peningkatan ekonomi yang didorong tingginya kesempatan kerja.

e. Hipotesis 5

Hipotesis 5 dalam penelitian ini menyatakan bahwa investasi melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia. Hasil analisis studi ini menunjukkan bahwa investasi melalui pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang positif pada kesempatan kerja pada jalur yang diperiksa, dengan nilai p value sebesar 0,174 dengan T statistik 0,939 dengan koefisien jalur negatif sebesar -0,195. Karena nilai p value > 0,10 dan T statistik < 1,65 maka dapat dinyatakan bahwa investasi melalui pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa secara langsung, investasi melalui pertumbuhan ekonomi tidak dapat berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Peningkatan investasi melalui pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat meningkatkan kesempatan kerja, Peningkatan investasi melalui pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat meningkatkan

¹⁰²Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: LP FE-UI, 2008).98.

¹⁰³Gusti Ayu Putu Ambara Ratih, Made Suyana Utama, and I Nyoman Mahaendra Yasa, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 1, no. 6 (2017), 29–54.

kesempatan kerja. Bukti ini tidak mendukung hipotesis 5, sehingga **hipotesis 5 ditolak**.

Investasi dalam model Schumpeter memiliki efek yang dapat diabaikan (tidak signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi memiliki koefisien yang positif. Besarnya pengaruh tersebut sesuai dengan tinjauan literatur yang digunakan, yang menunjukkan bahwa investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan. Dalam jangka panjang, variabel ekspor memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun koefisiennya negatif. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang dikemukakan Jung dan Marshall.¹⁰⁴ Dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa ekspor dapat berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Operasi ekspor membuat suatu negara rentan terhadap gejolak ekonomi global. Berbagai penelitian yang dilakukan di masa lalu menguatkan temuan ini. Sebagaimana penelitian berjudul “Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1980-2006” yang dilakukan oleh Sutawijaya¹⁰⁵

f. Hipotesis 6

Hipotesis 6 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia. Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa pada jalur yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja, diperoleh nilai p value sebesar 0,231 dengan T statistik 0,736 dengan koefisien jalur positif sebesar 0,147. Karena nilai p value > 0,10 dan T statistik < 1,65 maka dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Artinya, pengeluaran pemerintah tidak dapat secara langsung mengubah kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat meningkatkan kesempatan kerja, Peningkatan pengeluaran

¹⁰⁴P. Jung, W.S., & Marshall, “Exports, Growth and Causality in Developing Countries,” *Journal of Development Economic* 18, 1-12. (1985).

¹⁰⁵Fatmawati, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Model Solow Dan Model Schumpeter, 8.

pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat meningkatkan kesempatan kerja. Hal ini tidak mendukung hipotesis 6 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 6 **tidak diterima**.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hellen, Sri Mintarti, Fitriadi¹⁰⁶ yang menyebutkan kesempatan kerja akan dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengeluaran pemerintah melalui terjadinya pertumbuhan ekonomi, Nilai yang didapatkan menunjukkan bahwa pengaruhnya positif akan tetapi tidak substansial. Hal ini menunjukkan bahwa, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengeluaran pemerintah yang lebih besar akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja cukup kecil, karena pengeluaran pemerintah masih tidak efisien dan tidak efektif, sehingga kurangnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mengakibatkan bertambahnya kesempatan kerja.

Schumpeter menegaskan bahwa variabel pendidikan mungkin menurunkan ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dan kelangkaan prospek pekerjaan, yang mengakibatkan pengangguran. Karena tingginya tingkat pengangguran di satu sektor, orang pada akhirnya akan mencari pekerjaan di industri lain. Namun, pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.¹⁰⁷

g. Hipotesis 7

Hipotesis 7 dalam penelitian ini menyatakan bahwa zakat melalui pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Negara Indonesia. Pada jalur yang menunjukkan bahwa zakat melalui pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif pada kesempatan kerja, analisis studi ini menghasilkan nilai p sebesar 0,258 dan T statistik sebesar 0,650

¹⁰⁶Mintarti, "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja The Influence of Investment and Labor and Government Spending on Economic Growth and Employment.

¹⁰⁷Fatmawati, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Model Solow Dan Model Schumpeter."

dengan koefisien jalur negatif sebesar $-0,063$. Karena nilai p value $> 0,10$ dan T statistik $< 1,65$ maka dapat dinyatakan bahwa zakat melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa secara langsung, zakat melalui pertumbuhan ekonomi tidak dapat berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Peningkatan zakat melalui pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat meningkatkan kesempatan kerja, Peningkatan zakat melalui pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat meningkatkan kesempatan kerja. Hasil ini tidak mendukung hipotesis 7, sehingga **hipotesis 7 ditolak**.

Hasil ini menunjukkan bahwa dana zakat di Indonesia belum mampu secara signifikan mendukung meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat. Hal ini berbeda dengan dampak pada peningkatan bisnis dan peningkatan kualitas hidup penerima zakat, zakat memberikan hasil yg signifikan berbeda dengan penciptaan kesempatan kerja. Hal inilah yang menjadi penyebab kurangnya korelasi antara penerimaan zakat dengan kesempatan kerja. Hasil ini sesuai hasil studi Mohamed, et al¹⁰⁸ di Selangor Malaysia yang menjelaskan bahwa zakat tidak berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran meskipun zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dana zakat sebaiknya digunakan dalam bentuk zakat produktif.

Semakin besar penerimaan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat, semakin banyak juga uang zakat yang dapat dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu. Golongan Mustahik tidak hanya dapat memanfaatkan zakat sebagai pemenuh kebutuhan hariannya, tetapi juga dapat memanfaatkan zakat agar menjadi lebih produktif dengan bentuk bantuan modal usaha, barang modal, dan alat produksi untuk membantu mereka mengembangkan kehidupan mereka.

¹⁰⁸Khairul Amri, "Pengaruh Zakat Dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh," *Al-Muzara'Ah* 7, no. 2 (2020): 57–70.

BAB V

PENUTUP

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka Peneliti menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- a. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah variabel zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Hal ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah benar bahwa variabel zakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun meningkatkan penerimaan negara.
- b. Kompleksitas hubungan antar variabel merupakan kekuatan dari penelitian ini. Lapangan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Zakat, pengeluaran pemerintah, dan investasi adalah prediktor utama. Meskipun data zakat yang digunakan mewakili nilai total zakat, penelitian ini tidak memperhitungkan bentuk filantropi Islam lainnya seperti infaq dan sedekah, yang keduanya memiliki potensi yang signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi asalkan dikelola secara cara yang efektif.

B. Saran

- a. Hendaknya pemerintah Indonesia mencoba menggali potensi ekonomi seperti zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, variabel zakat memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik. Upaya untuk menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien.
- b. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk memasukkan data selain zakat seperti infaq, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya seperti wasiat, warisan, dan hibah dengan harapan dapat

menghasilkan kesimpulan yang mendekati kenyataan guna mengkaji potensi ekonomi yang ada di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jajang W. Mahri, Cupian, M. Nur Rianto Al Arif Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, Azizon, Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Abu-Lila, Ziad Mohammad. "Determinants Of Investment In The Jordanian Productive Sectors." *Journal Of Asian Finance, Economics And Business* 8, No. 4 (2021): 635–641.
- Ade Rahman, Choirul Yazid, Luqyan Tamanni, And Dkk. *Suplemen Ekonomi Islam*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Ri Dan Stei Tazkia, N.D.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. *Ekonomi Makro Islam*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2021.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Agustina, Neli, And Setia Pramana. "The Impact Of Development And Government Expenditure For Information And Communication Technology On Indonesian Economic Growth." *Journal Of Business Economics And Environmental Studies* 9, No. 4 (2019): 5–13.
- Al-Suhaibani, Muhammad Ibrahim. "Effect Of Zakat On Aggregate Demand, Dalam Monzer Kafh, Economics Of Zakat" (1997).
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. 7th Ed. Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya, 2008.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. 1st Ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. 1st Ed. Jakarta: Ui-Perss, 2012.
- Alkadri. "Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah" (2008).
- Amri, Khairul. "Pengaruh Zakat Dan Kesempatan Kerja Terhadap

- Tingkat Kemiskinan Di Aceh.” *Al-Muzara’ah* 7, No. 2 (2020): 57–70.
- Andini, G R. “Jurnal Pendidikan Untuk Semua Tahun.” *Jurnal Pendidikan* 5, No. 1 (2021): 54–63.
- Antonio, Syafi’i. *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Beik, Irfan Syauqi Dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Pt Radjagrafindo Persada, 2016.
- Bendesa, I K G. “Terhadap Kesempatan Kerja , Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : Sri_Danawati@Yahoo.Co.Id Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Disertai Dengan” 7 (2016): 2123–2160.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi ; Sebuah Tinjauan Islam, Alih Bahasa : Ikhwan Abidin*. Jakarta: Basri, Gema Insani Perss Dan Tazkia Institute, 2000.
- Chi Dieu Thi Nguyen, Bao Thai Luong, Huong Lan Thi Hoang. “The Impact Of Logistics And Infrastructure On Economic Growth: Empirical Evidence From Vietnam.” *International Journal Of Trade And Global Markets* 1, No. 1 (2021): 1.
- Chin, W. W. “The Partial Least Squares Aproach To Structural Equation Modeling, Modern Methods For Business Research” (1998): 295, 336.
- Dumairy, Syamsul Hadi, Muhammad. “Model Perhitungan Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Cmes Volume Xi Nomor 2 Edisi Juli Program Studi Sastra Arab Fib Uns Surakarta* (2018).
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. 1st Ed. Yogyakarta: Diva Perss, 2013.

- Euis, Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Faizin, Moh. *Buku Ajar Ekonomi Makro Islam*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2021.
- Fatmawati, Inma. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Model Solow Dan Model Schumpeter.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* (2015): 1–12.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1860>.
- Ghozali, Imam. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (Pls)*. Edisi 6. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- H.A.W., Widjaya. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Pt. Raja: Grafindo Persada, 2006.
- Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M. And Ringle, C.M. “When To Use And How To Report The Results Of Pls-Sem.” *Uropean Business Review* Vol. 31 No (2019): 5.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Herison, Herison, Sekolah Tinggi, And Ilmu Ekonomi. “B U K U A J A R E K O N O M I M A K R O (Buku Ii),” No. July (2018).
- Hertina. *Roblematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia*. Pekan Baru: Suska Press, 2013.
- Hidayat, Djunasien Dan. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu, Taimiyah. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Ishlah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*. Mesir: Dar Alkitab Al ‘Arabi, 1969.
- . *Majmu’ Fatawa Shaikh Alislam*. Riyad: Matabi Al-Riyad, 1963.
- . “Majmu’ Fatawa Shaikh Alislam.” *Matabi Al-Riyad* 28 (1963).

- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. 1st Ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indonesia, Bank. *Seri Ekonomi Dan Keuangan (Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara)*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Terjemahan Oleh Ansyari Thayib*. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1997.
- Islahi, Abdul Azim. "Economic Concepts Of Ibn Taimiyah." In *Islamic Foundation*. London: Islamic Foundation, 1988.
- Jhingan, M. L. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jurnal, Al-Tijary, Ekonomi Dan, Bisnis Islam, Jurnal Ekonomi, Agus Arwani, Iain Pekalongan, And Anis Wahdati. "The Effect Of Zakat, Infak, Sedekah (Zis), Human Development Index And Unemployment On Indonesia's Economic Growth" 5, No. 2 (2020): 159–173.
- Kahf, Monzer. *The Performance Of The Institution Of Zakah In Theory And Practice, The International Conference On Islamic Economics Towards The 21st Century*. Kuala Lumpur-Malaysia, 1999.
- Karim, Adiwirman A. *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kusuma, Ka. "Mengembangkan Indikator Ekonomi Islam Melalui Zakat: Sebuah Kerangka Untuk Mengukur Kesejahteraan Masyarakat/Negara Muslim," No. 9 (2016): 7–8. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7330>.
- Luth, Thohir. *Antara Perut Dan Etos Kerja, Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M, Marsono. *Konsep Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Mahalli, Kasyful. "Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan." *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah* 3, No.3 (2008): 127.

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. 1st Ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mhd.Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. 1st Ed. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mintarti, Sri. "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja The Influence Of Investment And Labor And Government Spending On Economic Growth And Employment" 13, No. 1 (2017): 28–38.
- Muhammad Azam, Nasir Iqbal Dan Muhammad Tayyab. "Zakat And Economic Development: Micro And Macro Level Evidence From Pakistan." *Bulletin Of Business And Economics* 3 (2014).
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*. 1st Ed. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014.
- Mustafa Edwin Nasution Dan Ranti Wiliasih Nurul Huda, Handi Risza Idris. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nanga, Muara. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin, Dkk. *Pengenalan Eksklusife Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Palindangan, Jeni, And Abu Bakar. "Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika." *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 5, No. 1 (2021): 65–80.
- Pirda, Irwan, And Atmi Danisa. "Penanaman Modal Asing Serta Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disusun Oleh :," No. 1 (N.D.).

- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Randi, Fuadi. *Kewenangan Dan Fungsi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pt. Rafika Adiatama, 2008.
- Ratih, Gusti Ayu Putu Ambara, Made Suyana Utama, And I Nyoman Mahaendra Yasa. “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 1, No. 6 (2017): 29–54.
- Samuelson, Paul A. *Makro-Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Simanjuntak, Payaman. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lp Fe-Ui, 2008.
- Solikin, Akhmad. “Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis.” *Info Artha* 2, No. 1 (2018): 65–89.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: . Lpfe-Ui, 2006.
- . *Makro Ekonomi Pengantar*. Edisi Ketii. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sularsih. “Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Kaltim” (2010).
- Sumbri, Mulyadi. *Manajemen Keuangan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Suprayitno, Eko. “Zakat And Sdgs : The Impact Of Zakat On Economic Growth , Consumption And Investment In Malaysia” 101, No. Iconies 2018 (2019): 202–209.
- Syahbudi, Muhammad. “Ekonomi Makro Perspektif Islam” (2018): 236.
- Syubaili, Ahmad, Bin Mohamed, Amir Aiman, Bin Ibrahim, Nurul Syuhada Binti, Mohd Naim, Bin Kamaruzaman, Et Al. “Does Zakat

- Significantly Impact On Economic Growth In Does Zakat Significantly Impact On Economic Growth In Selangor , Malaysia ?” 9, No. 6 (2019): 786–807.
- Taimiyah, Ibn. “Al-Siyasah Al-Syar’iyah Fi Ishlahi Ra’i Wa Ri’ayah.” Damaskus: Darul Bayan, 1966.
- Tulus, Tambunan. *Transformasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Ulya, Husna Ni’matul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teori Ekonomi Makro Konvensional Dan Islam*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2021.
- Ung, W.S., & Marshall, P.J. “Exports, Growth And Causality In Developing Countries.” *Journal Of Development Economic* 18, 1-12. (1985).
- Yusof, Mohammed B. “Zakat Expenditure, School Enrollment, And Economic Growth In Malaysia.” *International Journal Of Business And Social Science* Vol. 2 (2011): 6.

